HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
27 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

INTERNASIONAL

LIFE for Relief: Ribuan Perempuan dan Anak di Gaza Kehilangan Akses Pangan dan Layanan Kesehatan

Oleh telridi@lifeusa.org · 18 Nov, 19.09 WIB



Seorang pria dengan rompi biru yang merupakan realawan Life memberikan dua kaleng susu formula kepada seorang wanita yang sedang menggendong balita. Latar belakang menunjukkan lingkungan kamp pengungsian dengan tenda-tenda kain dan bangunan yang rusak di bawah sinar matahari yang terik. FOTO/Dok. Lifeusa.

Ribuan Janda, Perempuan, dan Anak Perempuan Menghadapi Kelaparan, Pengungsian, dan Hilangnya Akses terhadap Layanan Kesehatan

GAZA - Penderitaan perempuan di Jalur Gaza tidak lagi terbatas pada dampak perang dan menjadi janda di usia muda. Krisis kemanusiaan telah berkembang menjadi situasi yang semakin berat, memaksa ratusan ribu perempuan untuk menanggung sendiri tanggung jawab menghidupi keluarga dan merawat anak-anak mereka, di tengah pengungsian berulang, ketiadaan tempat tinggal yang layak, kekurangan pangan dan air bersih, serta memburuknya layanan kesehatan.

Laporan yang diterbitkan oleh UN Women mengungkapkan bahwa lebih dari 38.000 perempuan dan anak perempuan telah terbunuh sejak Oktober 2023, sementara lebih dari 172.000 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sekitar 11.700 perempuan dan anak perempuan mengalami cedera berat yang mengakibatkan disabilitas permanen. Kondisi ini menambah beban jangka panjang bagi para perempuan penyintas dan keluarga mereka, terutama karena terbatasnya layanan rehabilitasi, pengobatan, dan perawatan khusus.

Untuk mengetahui lebih jauh kondisi kemanusiaan perempuan Palestina, kami menghubungi Vicki Roob, Direktur Departemen Program Internasional di LIFE for Relief and Development, yang meraih peringkat kelima sebagai salah satu organisasi …

Selengkapnya di halaman 25 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 20
HIBURAN 23
Aneka Berita 25

NASIONAL

Gibran Mundur bukan Berarti Bebas hukum



Dari Suket Pendidikan, Dugaan Nepotisme hingga Kontroversi Fufufafa: Saatnya Mempertanggungjawabkan Semua Persoalan hukum.

Oleh: Syafril Sjofyan — Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FTAPengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari seluruh persoalan yang selama ini membelitnya.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Guru Besar IPDN Sebut yang Bisa Perintah Listyo hanya Jokowi, No Doubt!



BANDA ACEH - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid melontarkan pernyataan tajam terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gus Alex Akui Terima USD 75 Ribu dari Biro Haji, Sebut Pemberian Senior ke Junior



BANDA ACEH - - Mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mengakui pernah menerima uang sebesar USD 75.000 dari pihak biro perjalanan haji Pesona Mozaik. Uang tersebut diserahkan oleh staf operasional Pesona Mozaik bernama Nur alias Nanang.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Andi Widjajanto Ungkap: Hasil Sadapan Listyo Dicetak Lalu Dibawa Kurir ke Dua Kota



BANDA ACEH – Dalam perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pengamat pertahanan sekaligus Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, mengungkapkan modus distribusi hasil sadapan yang dilakukan secara fisik.Menurut Andi, para pelaku sengaja menghindari jalur digital …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

43 BERITA

NASIONAL

Gibran Mundur bukan Berarti Bebas hukum

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.46 WIB



Dari Suket Pendidikan, Dugaan Nepotisme hingga Kontroversi Fufufafa: Saatnya Mempertanggungjawabkan Semua Persoalan hukum.

Oleh: Syafril Sjofyan — Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FTAPengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari seluruh persoalan yang selama ini membelitnya. Justru sebaliknya, mundurnya Gibran harus menjadi momentum untuk membuka kembali berbagai dugaan pelanggaran hukum yang selama ini dipersoalkan masyarakat, tetapi belum memperoleh penyelesaian secara transparan dan tuntas.

Ada satu prinsip hukum yang tidak boleh dilupakan mundur dari jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Jabatan boleh ditinggalkan, tetapi pertanggungjawaban hukum tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Pertanyaannya, apakah setelah tidak lagi menduduki kursi Wakil Presiden, Gibran akan menghadapi proses hukum secara terbuka dan setara dengan warga negara lainnya? Ataukah pengunduran dirinya justru menjadi kesempatan untuk mengubur berbagai persoalan yang selama ini menggantung?

SUKET PENDIDIKAN, PERSOALAN YANG BERPOTENSI MASUK RANAH PIDANA

Persoalan paling serius adalah dugaan penggunaan dokumen Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Perkara ini tidak lagi semata-mata menjadi perdebatan Politik atau administratif. Pada 7 Oktober 2026, Aliansi Rakyat Menggugat melaporkan Gibran ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan tidak benar terkait persyaratan pencalonan.

Perkembangan berikutnya menjadi semakin penting. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Kemendikbudristek Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran tidak sah secara hukum. Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan sengketa hasil pemilu pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah setara SMA milik Gibran.

Dua perkembangan hukum tersebut seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jika dokumen yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan dinyatakan tidak sah, maka harus ditelusuri bagaimana dokumen itu diterbitkan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dokumen tersebut digunakan, dan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam proses penggunaannya.

Dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan dokumen yang tidak benar dapat diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan, termasuk Pasal 520 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta ketentuan KUHP mengenai penggunaan surat yang isinya tidak benar, dengan tetap memperhatikan unsur delik, waktu perbuatan, dan ketentuan hukum …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dokter Tifa Prediksi Wapresnya Prabowo dari Militer: Seorang Jenderal

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.21 WIB

BANDA ACEH - Teka-teki sosok Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memunculkan beragam prediksi. Dokter Tiffauzia Tyasumma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa memperkirakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memilih kandidat dari internal Partai Gerindra, melainkan sosok berlatar belakang militer.Prediksi tersebut disampaikan Dokter Tifa melalui unggahannya di media sosial. Ia menduga calon wakil presiden pengganti Gibran bisa berasal dari kalangan purnawirawan maupun perwira militer yang masih aktif.

"WAPRES siapa? Prediksi saya Wapres dari militer. Mungkin Purnawirawan. Mungkin aktif," tulis Dokter Tifa dalam keterangannya, Dikutip Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, prediksinya didasarkan pada perkiraan situasi geopolitik global yang menurutnya akan semakin memanas mulai 2027.

Dokter Tifa menilai potensi meluasnya Perang Dunia III hingga kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan sosok pendamping Prabowo.

Menurutnya, ancaman konflik berskala global tersebut telah disinggung Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dan dalam sejumlah pidato Prabowo sepanjang 2026.

Dokter Tifa berpandangan, meskipun Prabowo merupakan seorang jenderal, keberadaan wakil presiden dengan latar belakang militer juga akan membantu presiden menghadapi situasi geopolitik yang semakin kompleks.

"Presiden Prabowo Subianto yang walaupun seorang Jenderal tetap akan sangat terbantu jika Wakilnya juga Jenderal," ujarnya.

Lebih lanjut, Dokter Tifa menilai meluasnya konflik global dapat membawa konsekuensi besar terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia. Ia menyebut dampaknya berpotensi menghadirkan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Karena itu, menurutnya, momentum pergantian wakil presiden dapat menjadi kesempatan untuk menghadirkan sosok yang dinilai lebih kompeten, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik.

Dokter Tifa juga menyindir Gibran dengan menyinggung polemik terkait ijazahnya. Ia menyebut Prabowo tidak perlu lagi menjalankan peran sebagai "babysitter anak kurang ijazah".

"Entah prediksi saya ini benar atau meleset, kita patut bersyukur bahwa menjelang PD III yang meluas ini, Presiden Prabowo tidak perlu lagi jadi babysitter anak kurang ijazah," tulisnya.

Ia kemudian mengaitkan prediksinya dengan buku Ghost Fleet yang menggambarkan skenario konflik masa depan. Meski demikian, prediksi mengenai sosok wakil presiden pengganti Gibran tersebut merupakan pandangan pribadi Dokter Tifa dan belum menjadi keputusan resmi Presiden Prabowo.

NASIONAL

Guru Besar IPDN Sebut yang Bisa Perintah Listyo hanya Jokowi, No Doubt!

Oleh Redaksi · 18 Nov, 23.04 WIB



BANDA ACEH - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid melontarkan pernyataan tajam terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Ia menduga ada pihak yang lebih tinggi di atas Listyo Sigit dan memiliki pengaruh untuk memerintahkan operasi tersebut.Ryaas secara terbuka menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang menurut analisisnya paling mungkin memiliki pengaruh terhadap Listyo Sigit. Ia menilai sulit dipercaya jika dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan Listyo seorang diri tanpa keterlibatan pihak lain.

"Pasti ada orang di atasnya. Di atasnya Listyo Sigit cuma Jokowi," kata Ryaas Rasyid di Podcast Abraham Samad Speak Up, Rabu (18/11/2026).

Menurut Ryaas, hubungan kekuasaan dan pengaruh Politik yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya menjadi salah satu hal yang harus ditelusuri. Ia menilai hanya Jokowi yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk menggerakkan Listyo Sigit.

"Yang bisa memerintah Listyo karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?" ujarnya.

Ryaas juga menanggapi spekulasi yang mengaitkan nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam persoalan tersebut. Namun, ia meragukan Luhut memiliki kekuatan yang cukup besar untuk memerintah Listyo Sigit dalam perkara ini.

"Pak Luhut tidak se-powerful itu terhadap Listyo," tegasnya.

Lebih jauh, Ryaas mengingatkan agar penelusuran dugaan penyadapan tidak berhenti pada Listyo Sigit. Menurutnya, jika proses pengungkapan hanya menyasar mantan Kapolri tanpa mengusut kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, hal itu justru berpotensi menghambat pencarian kebenaran.

Ia bahkan menyebut penghentian pengusutan pada Listyo Sigit sebagai bentuk pengkhianatan terhadap upaya mengungkap fakta sebenarnya.

"Berhenti pada Listyo itu adalah satu pengkhianatan terhadap usaha membuka kebenaran. Terlalu dipaksakan bahwa hanya berhenti di Listyo," katanya.

Ryaas juga menyoroti pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang sebelumnya menyebut Listyo Sigit sebagai end user dalam dugaan penyadapan tersebut. Pernyataan itu, menurut Ryaas, perlu dicermati karena menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya aktor lain di balik operasi tersebut.

Ia turut menghubungkan perkembangan itu dengan pengunduran diri Gibran yang terjadi tidak berselang lama dari polemik penyadapan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, Langsung Banding

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.01 WIB

BANDA ACEH - Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026).

"Atas Putusan tersebut pelanggar EHS menyatakan banding," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, dalam sidang KKEP terungkap dugaan permufakatan akses ilegal terhadap sistem milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gus Alex Akui Terima USD 75 Ribu dari Biro Haji, Sebut Pemberian Senior ke Junior

Oleh Redaksi · 18 Nov, 19.06 WIB



BANDA ACEH - - Mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mengakui pernah menerima uang sebesar USD 75.000 dari pihak biro perjalanan haji Pesona Mozaik. Uang tersebut diserahkan oleh staf operasional Pesona Mozaik bernama Nur alias Nanang.

Pengakuan itu disampaikan Alex saat menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/11).

Dalam sidang tersebut, Alex dihadirkan sebagai saksi mahkota atau terdakwa yang memberikan kesaksian untuk terdakwa lainnya.

Di hadapan majelis hakim, Alex menjelaskan bahwa uang tersebut diberikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari seorang senior kepada junior. Ia pun membenarkan nominal uang yang diterimanya ketika dikonfirmasi oleh jaksa penuntut umum (JPU).

"Kami masih ingat mencatat Pesona Mozaik, kan begitu?" tanya jaksa.

"Nilainya kurang lebih 75.000 dollar AS?" lanjut jaksa.

"Betul," jawab Alex.

Jaksa kemudian menelusuri adanya tambahan uang sebesar USD 10.000 yang disebut-sebut dititipkan untuk Rizky Fisa Abadi, salah seorang pejabat di Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Alex, uang tersebut disimpan dalam amplop terpisah.

"Total 85.000. Nah, yang 10.000 itu di amplop berbeda warna putih bahasanya titip untuk Rizky," timpal Alex.

Alex kemudian membeberkan awal mula dirinya berkomunikasi dengan pihak Pesona Mozaik. Ia menyebut, perkenalan dengan Nanang bermula ketika pria tersebut datang ke rumahnya bersama Muis Ali Murtadho. Saat itu, keduanya membicarakan kemungkinan pengusulan jemaah haji.

Alex mengaku kemudian menghubungi Nur Arifin, mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor telepon Rizky Fisa Abadi. Nomor kedua pejabat tersebut lantas diberikan kepada Nanang agar komunikasi dapat dilakukan secara langsung.

"Terkait dengan Pesona Mozaik itu atas nama Nanang, yang nama aslinya Ahmad Faudzin. Saya baru tahu nama aslinya Ahmad Faudzin itu belakangan. Setahu saya namanya Nanang. Nanang yang diajak oleh Pak Muis, Mas Muis Ali Murtadho ke rumah saya, kemudian menyampaikan untuk mengusulkan jemaah yang saya tidak paham, kemudian saya menghubungi Mas Nur Arifin baru dikasih nomornya Rizky Fisa Abadi," beber Alex.

"Nah, nomor Rizky Fisa Abadi ini kemudian yang saya serahkan kepada, saya serahkan kepada Mas Nanang sekaligus nomornya Pak Nur Arifin kemudian termasuk kepada …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Andi Widjajanto Ungkap: Hasil Sadapan Listyo Dicetak Lalu Dibawa Kurir ke Dua Kota

Oleh Redaksi · 18 Nov, 20.09 WIB



BANDA ACEH – Dalam perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pengamat pertahanan sekaligus Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, mengungkapkan modus distribusi hasil sadapan yang dilakukan secara fisik.Menurut Andi, para pelaku sengaja menghindari jalur digital agar jejak elektronik putus. Data hasil sadapan yang diambil dari server Lawful Interception Management System (LIMS) diunduh secara luring menggunakan perangkat USB, kemudian dicetak menjadi dokumen fisik (print out). Dokumen tersebut lalu dikirim via kurir dari Jakarta ke kota lain yang disebut sebagai kota X dan Y.

“Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar Andi Widjajanto pada Selasa (17/11/2026).

Andi menilai cara ini justru memudahkan penelusuran karena melibatkan aktivitas fisik pengiriman. Ia meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri telah mengantongi identitas dalang utama serta jejaring di atas Listyo Sigit melalui alur distribusi dokumen tersebut.

Kasus ini berawal dari temuan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang memaparkan bahwa Listyo Sigit diduga berperan sebagai pemberi perintah, penentu target, sekaligus penerima akhir (end user) hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur yang sah. Hasil sadapan dilaporkan secara harian maupun dalam bentuk analisis kepada Listyo. Pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan data di sistem LIMS dan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi operasi.

Andi Widjajanto sebelumnya juga menyoroti kejanggalan perangkat penyadapan yang digunakan serta kemungkinan adanya infrastruktur yang dibawa dari jabatan sebelumnya. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk deep state yang memanfaatkan kewenangan dan sistem kepolisian secara ilegal.

Hingga saat ini, nama kota X dan Y yang disebut Andi belum diungkapkan secara terbuka. Polri melalui Kapolri Suyudi menegaskan penanganan perkara ini murni proses penegakan hukum dan tidak terkait persaingan internal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ray Rangkuti Minta Prabowo Libatkan Publik Tentukan Cawapres: Jangan Seperti Ganti Menteri

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.05 WIB

BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengimbau Presiden Prabowo Subianto memberi waktu kepada publik untuk menilai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dia mengusulkan masyarakat diberi kesempatan setidaknya empat hari untuk menyampaikan pandangan sebelum nama calon diajukan kepada MPR.

Ray menilai, proses pengisian jabatan wapres tidak bisa disamakan dengan pergantian menteri yang menjadi hak prerogatif presiden. Menurutnya, jabatan wapres memiliki kedudukan tersendiri karena dipilih bersama presiden.

"Secara administratif, yang mengusulkan kepada MPR adalah presiden bersama dengan koalisi. Tapi hak mengusulkan semua warga negara boleh, berhak," kata Ray dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Bursa Kursi Wapres, Siapa Pengganti Gibran?" di iNews, Selasa (17/11/2026).

Dia menilai partisipasi masyarakat perlu diperhatikan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Karena itu, presiden diharapkan tidak langsung mengajukan nama tanpa terlebih dahulu memberi ruang bagi publik untuk menyampaikan penilaian.

"Oleh karena itu unsur partisipasi masyarakatnya sebaiknya tidak dilupakan oleh presiden. Saya mengimbau agar presiden memberi empat hari setidaknya kepada publik untuk menilai nama-nama yang disodorkan presiden kepada MPR," ujarnya.

Ray menegaskan, proses tersebut perlu melibatkan masyarakat karena jabatan wapres bukan sekadar posisi pembantu presiden.

"Jadi jangan dipandang ini seperti mengganti menteri yang memang hak prerogatifnya ada pada presiden. Tapi wakil presiden menurut saya tidak bisa begitu. Harus ada proses yang disebut dengan pelibatan publik di dalamnya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ray juga menanggapi munculnya nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Gibran.

Ray menyambut baik munculnya nama Dasco. Namun, dia menilai publik tetap perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai kelayakan calon tersebut kepada presiden.

"Saya senang kalau misalnya saat ini Gerindra sudah menyebutkan nama yang agak unggul namanya Dasco. It's okay. Nah tinggal sekarang publik memberi masukan kepada presiden apakah calon ini layak atau tidak," tuturnya

NASIONAL

Polisi Temukan Celana Korban Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.06 WIB

BANDA ACEH - Polisi mengungkap temuan saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang, Yosep Lede, di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Olah TKP tersebut berkaitan dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswi berusia 21 tahun."Olah TKP sudah kami laksanakan dan hasilnya kami temukan satu celana yang digunakan pada saat korban disuruh menggantikan celananya," ujar Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto, Selasa (17/11/2026).

Reza mengatakan, olah TKP dilakukan oleh personel Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.38 WIB

BANDA ACEH -Bursa calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka, sedang hangat dibahas publik.

Sejumlah nama bermunculan. Salah satunya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menyebut Yusril Ihza Mahendra punya pengalaman panjang dengan pernah menduduki jabatan di eksekutif, bahkan sejak era pemerintahan orde baru.

"Saya kira soal kapasitas dia sebagai seorang pejabat di pemerintahan, tidak perlu diragukan lagi. Dia juga cukup cakap, misalnya di urusan administrasi tata negara," ujar Lucius kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Menurut Lucius, sosok wapres yang ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo harus memiliki pengalaman dan punya pengetahuan mengelola negara.

Selain itu, kata Lucius, figur itu juga harus mendapat kepercayaan dari presiden untuk menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Roy Suryo Pamer Kaus Baru, Sindir Rismon Tak Hadir Sidang Kasus Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 18 Nov, 18.54 WIB



BANDA ACEH - Terdakwa Roy Suryo menyindir Rismon Sianipar yang tidak hadir dalam sidang kasus dugaan fitnah terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (18/11/2026).

Rismon sebelumnya dipanggil jaksa penuntut umum (JPU) untuk menjadi saksi dalam persidangan tersebut.

Sindiran itu disampaikan Roy saat sesi jumpa pers seusai persidangan. Dia membuka kancing kemejanya untuk memperlihatkan kaus putih bergambar wajah Rismon dengan tulisan 'Rismon End Game'.

Roy juga meminta Rismon memenuhi panggilan jaksa dan hadir di persidangan.

"Wah, ini Rismon End Game, ya. Gitu. Jadi hari ini end game dia, ya. Gitu, tapi bukan end game lah, nanti silakan datang," kata Roy sambil menunjuk kaos yang dikenakannya, Rabu (18/11/2026).

Roy kemudian mengungkit pernyataan Rismon yang sebelumnya disebut antusias ingin memberikan keterangan di ruang sidang. Namun, saat dipanggil sebagai saksi, Rismon justru tidak hadir.

"Nah, Rismon Hasiholan Sianipar. Karena Rismon itu sudah menantang-nantang untuk bisa hadir," kata Roy.

Meski Rismon tidak hadir, persidangan tetap berlangsung. JPU menghadirkan dua saksi lainnya, yakni mantan Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU DKI Jakarta Binsar ST Siagian serta ASN Sekretariat Jenderal KPU, Bagus Makawaru.

Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025, ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Unggahan itu terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang pada pokoknya menuding ijazah S-1 Jokowi palsu.

Jaksa menilai Roy menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis foto ijazah Jokowi. Analisis tersebut, menurut jaksa, dilakukan tanpa verifikasi, konfirmasi, atau izin dari Jokowi selaku pemilik dokumen.

Hasil analisis itu disebut digunakan untuk mendukung tudingan ijazah S-1 Jokowi tidak asli.

Atas perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP serta ketentuan UU ITE, yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1), sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

NASIONAL

Ini Analisis Denny Indrayana Soal Dugaan Kesepakatan Tertulis Prabowo dan Jokowi

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.39 WIB



BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menduga adanya kemungkinan perjanjian Politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Denny menilai, dugaan adanya kesepakatan antara kedua tokoh tersebut bukan sesuatu yang janggal dalam dinamika politik. Terlebih, Prabowo sebelumnya juga pernah terlibat dalam perjanjian politik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian Batu Tulis yang ditandatangani Prabowo dan Megawati pada 16 Mei 2009. Kesepakatan tersebut sempat menjadi sorotan karena berkaitan dengan pencalonan presiden pada Pilpres 2014.

"Kalau itu ada informasi dari 1 2 3 4 orang bahwa ada perjanjian antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan itu tidak aneh, biasa itu," ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, dikutip Rabu (18/11).

"Antara Prabowo dengan Megawati dulu sempat terbuka kan soal perjanjian batu tulis harusnya 2014 itu yang dicalonkan Prabowo ternyata Jokowi kan sempat ramai saat itu, ada perjanjian-perjanjian semacam itu," lanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut, Denny menilai bukan tidak mungkin Prabowo dan Jokowi juga memiliki kesepakatan tersendiri menjelang Pilpres 2024.

Bahkan, ia menduga perjanjian tersebut berpotensi dibuat secara tertulis dengan menggunakan tulisan tangan. Menurutnya, cara itu bisa saja dipilih untuk menjaga keaslian dokumen atau otentisitas kesepakatan.

"Saya menduga perjanjiannya sebagaimana biasanya tertulis tangan. Untuk menjaga otentisitasnya, keasliannya. Bukan diketik tapi tulis tangan gitu," jelasnya

Denny juga menyampaikan analisis mengenai kemungkinan adanya klausul yang berkaitan dengan jaminan keamanan dari persoalan hukum. Namun, ia menegaskan hal tersebut merupakan dugaan atau analisis pribadinya.

"Dan analisis kalau ini tidak aneh kalau di situ ada masalah jaminan keamanan dari masalah hukum. Itu analisis saya salah satu pointernya. Kalau saya yang buat itu akan ada itu," tandasnya.

NASIONAL

Jokowi Disebut Tak Akan Tinggal Diam, Pengamat Ungkap Dugaan Perlawanan Geng Solo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 16.00 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik Rudi S. Kamri menduga kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo tengah menyiapkan langkah Politik untuk menghadapi dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bukan sosok yang akan tinggal diam menghadapi perkembangan situasi politik.“Kan mereka melihat bahwa Geng Solo, Mas, kita tahu karakter seorang Jokowi tidak akan mungkin diam begitu saja,” kata Rudi dikutip dari YouTube Forum Keadilan, Selasa (17/11/2026).

Rudi menilai pernyataan Jokowi yang menyatakan dukungan kepada Prabowo belum tentu menggambarkan seluruh sikap politiknya. Ia menduga ada strategi lain yang mungkin dijalankan di balik pernyataan tersebut.

“Di depan dia bilang dukung Prabowo, tapi di belakang dia garap juga pasti. Bisa jadi sekarang bahwa dia bilang, 'Wah, jabatan itu sementara,' dan sebagainya. Itu karakter Jowo,” ujarnya.

Rudi kemudian membeberkan tiga skenario yang menurutnya beredar dalam analisis politik terkait kemungkinan perlawanan kelompok tersebut. Skenario pertama, Gibran Rakabuming Raka disebut akan menjadi presiden apabila Prabowo berhasil dijatuhkan, sementara sosok berinisial Mr. D diproyeksikan sebagai wakil presiden.

“Plan A kalau Geng Solo sukses tumbangkan Prabowo, maka Gibran Presiden dan saya bilang Mr. D jadi Vice President,” ungkapnya.

Ia mengklaim skenario tersebut telah dibicarakan dan disepakati sejumlah partai politik, yakni Golkar, PKB, PAN, dan PSI. Namun, Rudi tidak membeberkan bukti maupun identitas pihak yang disebut menyepakati rencana tersebut.

“Ini sudah disepakati partai-partai katanya Golkar, PKB, PAN, PSI,” katanya.

Skenario kedua, menurut Rudi, adalah mendorong sosok Mr. D menjadi wakil presiden. Ia menyebut identitas sosok tersebut masih terbuka dan bisa berasal dari siapa saja.

“Plan B mereka paksakan Mr. D jadi wapres. Mr. D itu bisa siapa aja, ya kan? Can be anyone,” ujarnya.

Rudi menduga langkah tersebut bertujuan mempertahankan pengaruh kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo di pemerintahan, termasuk mengamankan posisi orang-orang yang disebut berada di jajaran komisaris.

“Agar kekuatan Solo masih ada di pemerintahan. Orang-orang Geng Solo yang ada di komisaris-komisaris masih bisa diamankan,” jelasnya.

Adapun skenario ketiga yang disampaikan Rudi adalah dugaan upaya menciptakan kerusuhan. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci bentuk kerusuhan maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Mereka akan membuat kerusuhan,” katanya.

NASIONAL

Yusril Ungkap Kemungkinan Tersangka Baru Penyadapan Prabowo, Dalang bakal Terungkap?

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.46 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan terdapat kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyelidikan yang dilakukan polisi diharapkan dapat menguak tujuan penyadapan, pihak yang memanfaatkannya, serta kepentingan di balik tindakan tersebut.

"Mungkin juga akan ada tersangka-tersangka baru, dan juga akan juga akan terungkap sebenarnya ke mana arah daripada penyadapan dan kemudian …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id
Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Terungkap! Dua Eks Napiter Bakar Warung Mi Babi Sukoharjo karena Alasan Ini

Oleh Van · 17 Nov, 18.13 WIB

JAWA TENGAH — Motif pembakaran Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Sukoharjo, Jawa Tengah, akhirnya terungkap.

Dua tersangka yang merupakan mantan narapidana terorisme diduga melakukan aksi tersebut karena tidak menyukai penjualan mi babi di lokasi itu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut pada Selasa, 17 November 2026.

Dua Eks Napiter Tak Suka Penjualan Mi Babi

“Mereka tidak suka ada orang yang jualan mie babi di tempat tersebut,” ungkap Anwar pada Selasa, 17 November 2026.

Kedua tersangka dalam perkara ini berinisial ST dan I. Keduanya telah diperiksa penyidik setelah ditangkap dalam rangkaian pengungkapan kasus.

Warung Mi dan Babi Tepi Sawah berada di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Tempat usaha tersebut dibakar dan dirusak pada Sabtu, 12 September 2026, oleh sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Dua Tersangka Sudah Ditangkap Polisi

Tersangka ST atau AS ditangkap lebih dahulu pada Senin, 19 Oktober 2026, di sebuah rumah di Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Sukoharjo.

Sementara itu, tersangka I ditangkap di wilayah Kota Surakarta pada Jumat, 6 November 2026, setelah sebelumnya masuk daftar pencarian orang.

Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra menyampaikan penangkapan I dalam keterangan pers di Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu, 7 November 2026.

“Tersangka I sebelumnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan berhasil diamankan di wilayah Solo atau Surakarta,” kata Indra.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id
Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yaqut Tolak Jadi Saksi Sidang Gus Alex dkk dalam Kasus Korupsi Kuota Haji: Saya Merasa Tidak Berkaitan

Oleh Van · 18 Nov, 17.47 WIB



Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan pernyataan resmi dalam sebuah agenda pertemuan.

JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menolak menjadi saksi bagi tiga terdakwa lainnya dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.

Penolakan tersebut disampaikan langsung kepada Hakim Ketua dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham; serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani awalnya menanyakan kesediaan Yaqut untuk memberikan kesaksian dalam perkara ketiga terdakwa tersebut.

Namun, Yaqut menyatakan tidak bersedia dengan alasan merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjerat mereka.

“Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Yaqut dalam persidangan tersebut.

Klaim Menjaga Kondisi Kesehatan

Di sisi lain, kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menjelaskan bahwa keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi kesehatan kliennya.

Menurut Mellisa, Yaqut perlu menjaga kondisi agar tetap fokus dalam memberikan keterangan sebagai terdakwa.

“Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia,” ujar Mellisa.

Tiga Terdakwa Lain Bersedia Menjadi Saksi

Berbeda dengan Yaqut, ketiga terdakwa lainnya menyatakan bersedia menjadi saksi untuk perkara masing-masing, termasuk perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.

Adapun kasus yang menjerat keempat terdakwa berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.

Bermula dari tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi sejumlah 20.000 dan menurut aturan Undang-Undang kuota tambahan harusnya dialokasikan 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.

Persoalan pembagian kuota tersebut tercantum dalam Pasal 64 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam realisasinya, kuota yang diberikan kemudian menjadi 50:50 hingga ada ada dugaan aliran dana untuk mempercepat keberangkatan haji.

KPK mendakwa perkara tersebut telah menyebabkan kerugian pada negara sekitar Rp622,09 miliar.

Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat melakukan penghitungan kerugian negara atas …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kemensetneg Diminta Bersihkan Istana dari “Orang Titipan” Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 18 Nov, 18.39 WIB



BANDA ACEH -Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) diminta segera melakukan sterilisasi menyeluruh di lingkar inti kepresidenan dari personel yang diduga merupakan titipan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Sugiat meminta Kemensetneg meninjau ulang personel yang bertugas di lingkungan terdekat Presiden, terutama mereka yang disebut merupakan rekomendasi pejabat kepolisian pada era Listyo Sigit.

"Saya berharap saya blak-blakan saja karena ini kepentingan Partai Gerindra dan bukan hanya kepentingan Partai Gerindra, kepentingan bangsa ini. Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!" tegas Sugiat.

Menurut Juru Bicara Partai Gerindra itu, evaluasi tersebut penting untuk menutup celah penyusupan yang berpotensi mengancam keamanan Presiden maupun memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Sugiat pun secara khusus meminta pemeriksaan dilakukan terhadap personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) hingga jajaran birokrasi di lingkungan Kemensetneg.

"Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri. Kan banyak ini ketika apa ya penyusunan jajaran birokrasi kementerian ada dari sini ada dari sini. Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi, tidak disusupi, dan yang paling penting ini menjaga bagaimana apa ya kebijakan itu tetap pro terhadap rakyat," katanya.

Sugiat juga menyoroti dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang dinilainya menunjukkan lemahnya sistem pengamanan Istana. Ia meminta Kemensetneg memperkuat perangkat teknologi untuk mendeteksi ancaman penyadapan, baik melalui alat yang dipasang secara langsung maupun teknologi jarak jauh.

"Saya pikir ini yang paling penting dari tugas Kementerian Sekretariat Negara ke depan. Memastikan ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril," tegasnya.

Sugiat mengaku belum mengetahui secara terperinci metode penyadapan yang digunakan. Namun, menurutnya, ketidakpastian tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Istana untuk tidak memiliki sistem pendeteksi ancaman yang memadai.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hard Gumay Ungkap Kericuhan Politik hingga Dugaan Kudeta di 2027

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.33 WIB

BANDA ACEH - Ramalan paranormal bernama Hard Gumay membocorkan soal situasi Politik Indonesia yang akan menjadi perhatian di 2027.Mulai dari potensi aksi provokasi, demonstrasi anarkis, hingga dugaan percobaan kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, ramalan Hard Gumay ini tetap merupakan prediksi yang tidak dapat dipastikan 100 persen kebenarannya.

Seluruh pernyataan Hard Gumay dalam pembahasan ini perlu dipahami sebagai klaim atau penglihatan pribadi, bukan fakta yang telah terbukti.

Sebelumnya, Hard Gumay pernah mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan munculnya ketegangan politik di Indonesia.

Hard Gumay menyebut masih ada pihak yang belum menerima kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sebuah percakapan, Hard Gumay ditanya mengenai situasi politik Indonesia dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan terjadinya perpecahan dan aksi provokasi.

"Perpecahan, anarkis, provokasi," demikian gambaran awal yang disampaikan Hard Gumay, dikutip dari kanal YouTube Sumbu Cahaya pada Selasa, 17 November 2026.

Hard Gumay kemudian menjelaskan bahwa menurut penglihatannya, masih ada sosok yang tidak menerima hasil kemenangan Prabowo dan Gibran.

"Jadi yang terjadi itu ada orang yang masih enggak legawa, enggak terima atas kemenangan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran itu. Jadi, ada sosok yang enggak terima dan memprovokasi, jadi provokator yang demo, melakukan hal-hal anarkis," ujarnya.

Hard Gumay bahkan memperkirakan potensi kericuhan tersebut bisa lebih besar dibandingkan peristiwa 2019.

"Walaupun ini cukup besar nih terjadinya, cukup besar dibanding 2019. Cukup besar ini, lebih besar," katanya.

Ia pun mengingatkan pemerintah, terutama Presiden Prabowo, agar berhati-hati menghadapi kemungkinan tersebut.

"Jadi ini catatan penting menurut gue untuk pemerintah kita, terutama untuk Bapak Prabowo, hati-hati," lanjutnya.

Akan tetapi Hard Gumay juga menyampaikan pesan kepada pihak yang menurutnya berpotensi melakukan provokasi.

"Percuma. Yang ada ini akan merugikan diri dia sendiri atas ketidakterimaan dia, atas kemenangan Bapak Prabowo Subianto," tuturnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 19.56 WIB

BANDA ACEH - Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH ," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Pada sidang KKEP, kata Trunoyudo, terduga pelanggar melakukan permufakatan kegiatan illegal access milik Polri untuk penyadapan tidak profesional dan prosedural. Putusan tersebut tertuang dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar secara tertutup oleh Polri.

Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete, Diduga Jadi Posko Makar

Oleh Redaksi · 18 Nov, 16.44 WIB



BANDA ACEH – Bareskrim Polri menggeledah rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa malam (17/11). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana makar yang menyeret jenderal bintang dua itu.Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Condro Kirono membenarkan penggeledahan tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (18/11).

Dia menyebut, rumah tersebut diduga digunakan Eko sebagai posko untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara.

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar," kata Susatyo.

Meski demikian, Susatyo belum membeberkan hasil penggeledahan maupun barang bukti yang ditemukan penyidik. Informasi lebih lengkap, kata dia, akan disampaikan melalui konferensi pers resmi Bareskrim Polri.

"Akan disampaikan saat prescon lengkap," ujarnya.

Penggeledahan tersebut berlangsung bersamaan dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Eko yang berstatus sebagai terduga pelanggar.

Dalam sidang tersebut, Eko dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan itu berkaitan dengan pelanggaran etik dalam kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, putusan sidang KKEP terdiri atas dua jenis sanksi.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.

"Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.

Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam

Sidang etik terhadap Eko berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo.

Setelah majelis membacakan putusan, Eko menyatakan mengajukan banding.

"Atas putusan itu, EHS (Eko) mengajukan banding," ujar Trunoyudo.

Sesuai ketentuan yang berlaku, majelis KKEP telah menerima pengajuan banding tersebut. Polri selanjutnya akan membentuk komisi banding untuk memeriksa kembali perkara Eko.

Trunoyudo memastikan hasil sidang banding nantinya juga akan disampaikan kepada publik secara terbuka.

Sebelumnya, Polri telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dalam perkara dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Viral Tahanan Makan Bersama di Restoran Mewah, Polda Sumut Minta Maaf

Oleh Redaksi · 17 Nov, 19.55 WIB

BANDA ACEH - Viral di media sosial, sejumlah tahanan kasus narkoba yang mengenakan baju warna orange bertuliskan tahanan dengan tangan diborgol, makan bersama dengan polisi di salah satu restoran mewah yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara.Dalam video viral itu, para tahanan duduk bersama dengan para polisi yang mengenakan pakaian putih dan pria mengenakan pakaian provost, duduk berhadap-hadapan.

Dari informasi yang didapat, Selasa (17/11), menyebutkan tahanan yang makan bersama anggota polisi merupakan pelaku tindak pidana narkoba Polres Asahan.

Menanggapi itu, Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Gunawan, saat dikonfirmasi membenarkan rekaman video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah tahanan narkoba makan bersama personel polisi di salah satu restoran.

Ia menjelaskan, awalnya sejumlah tahanan dengan pengawalan ketat dibawa dari Mapolres Asahan untuk menghadirkan konferensi pengungkapan kasus narkoba di Mapolda Sumut, Senin (16/11).

"Karena dari pagi belum sarapan dan setelah acara konferensi pers di Polda Sumut selesai, anggota membawa tahanan itu untuk makan. Setelah itu kembali ke Mapolres Asahan," jelasnya bahwa saat makan para tahanan itu mendapat pengawalan sangat ketat.

Pemandangan langka itu terjadi tak lama setelah Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan menggelar konferensi pers pengungkapan kasus yang dilakukan pihaknya dari tanggal 1 Oktober hingga 15 November 2026.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), turut merespon video viral yang memperlihatkan sejumlah tahanan kasus narkoba sedang makan bersama anggota polisi di salah salah satu restoran yang ada di Jalan SM Raja, Kota Medan, Sumatera Utara.

Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan membenarkan dan menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kejadian yang menyita perhatian publik tersebut. Mereka berjanji juga akan memproses anggota yang turut serta dalam kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Benar di dalam video tersebut adalah anggota kami. Kami atas nama Polda Sumatera Utara menyampaikan permintaan maaf apabila masyarakat atau publik merasa tidak nyaman atas kejadian tersebut. Ketiga, kami akan proses anggota kami bila terbukti melakukan pelanggaran dalam video tersebut," sebut Kombes Pol Dr Ferry Walintukan, Selasa (17/11/2026) pagi.

Lebih lanjut Ferry juga menambahkan pasca video viral tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam), Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Tak Seharusnya Disalahkan, Mahfud MD: Seperti Pinjam Mobil untuk Mencuri

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.27 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menggunakan analogi pinjam mobil untuk mencuri guna menjelaskan posisi Gibran Rakabuming Raka dalam kasus surat penyetaraan ijazah. Menurutnya, pembatalan pencalonan tidak bergantung pada apakah Gibran terlibat dalam rekayasa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Pembahasan bermula dari anggapan sebagian pihak bahwa Gibran tidak seharusnya disalahkan. Argumennya, surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan, sedangkan aturan yang membolehkan Gibran mendaftar dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahfud membenarkan pembagian peran itu, tetapi menilai kesalahan terletak pada cara dokumen dan aturan tersebut dipakai.

“Tapi dibuatnya dan KPU-nya salah menggunakan Gibran, kan gitu kan,” kata Mahfud.

Untuk menggambarkan posisi itu, ia mengajukan perumpamaan. “Sama Anda, saya pinjam mobilnya untuk mencuri, ya kan? Lalu ketangkap. Anda enggak salah, apa? Mobilnya dibiarkan sebagai alat pencurian,” ujarnya. Ia menyebut itulah logika yang ia pakai untuk menjelaskan kasus tersebut.

Mahfud kemudian mengaitkan analogi itu dengan pertanyaan soal keterlibatan Gibran dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, ada kemungkinan Gibran tidak ikut serta, tetapi Gibran semestinya mengetahui kondisi dirinya saat itu. Mahfud menyebut Gibran tahu tidak memiliki ijazah yang dipersoalkan dan belum berusia 40 tahun, serta memiliki kepentingan dalam proses itu.

Meski begitu, ia menekankan hal tersebut tidak otomatis berarti Gibran ikut merekayasa. “Bisa jadi ketika diusut, taruhlah dia bersih. Ada konspirasi misalnya,” kata Mahfud.

Ia lalu menegaskan bahwa status bersih atau tidaknya Gibran tidak mengubah konsekuensi hukumnya. “Kalau dia misalnya bersih, taruhlah dia bersih, ya tetap aja harus batal,” ujarnya.

Mahfud mengalihkan sorotan kepada pihak yang menurutnya harus mempertanggungjawabkan proses tersebut. “Yang harus dihukum itu siapa? Orang yang melakukan rekayasa ini, siapa itu? KPU itu harus diusut,” katanya.

NASIONAL

Kembali Dapat Dukungan untuk Jadi Cawapres, Dasco Disebut Prodem Representasi Kepemimpinan Sipil

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.33 WIB

BANDA ACEH - Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka kembali muncul. Kali ini datang dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule. Dia menyebut, Dasco merupakan representasi kepemimpinan sipil.

Kepada awak media, Iwan menyatakan bahwa Dasco bisa mengawal dan memastikan pengejawantahan amanat reformasi yang diperjuangkan oleh dirinya bersama aktivis 98 lain. Terlebih, wakil ketua DPR itu sudah berulang menjadi jembatan antara suara masyarakat sipil dengan negara.

”Dasco juga memiliki kemampuan menjembatani kepentingan rakyat dan negara, sebagai problem solver yang efektif dan realistis menemukan solusi permasalahan kebangsaan, sekaligus cita-cita mewujudkan kehadiran demokrasi di setiap sendi kehidupan hingga ke piring-piring rakyat,” kata Iwan pada Selasa (17/11).

Dari aspek Politik, Iwan mengungkapkan bahwa modal Dasco sangat kuat. Baik dari internal Gerindra maupun dari berbagai elemen dan simpul-simpul perwakilan masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut dia, dukungan itu datang karena rekam jejak Dasco selama bertugas di parlemen. Politisi berjuluk kancil itu sudah menunjukkan kapasitas komunikasi dan inisiatif politik yang matang. Dasco diyakini mampu menjaga stabilitas demokrasi dan pemerintahan di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

Setidaknya ada dua poin utama sebagai sumber kekuatan Dasco. Pertama, dia punya kemampuan konsolidasi yang solid dalam mencairkan kebekuan komunikasi, kebuntuan politik, serta merajut berbagai simpul …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Skandal Suap HGB Summarecon, Fahd A Rafiq Ngaku Beri Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Oleh Redaksi · 18 Nov, 16.31 WIB



BANDA ACEH - Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq, mengaku telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Politikus Partai Golkar itu bahkan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menangkap dan menetapkan dirinya sebagai tersangka."KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan, dikutip Rabu (18/11/2026).

Fahd mengeklaim uang tersebut diberikan untuk kepentingan Muktamar NU, bukan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang kini menjeratnya.

Sebelumnya, Fahd juga mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen berinisial AS, yang turut menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi ATR/BPN.

Menurut Fahd, permintaan uang itu disampaikan beberapa kali pada Agustus 2026. Ia mengaku sempat menolak sebelum akhirnya memberikan dana yang disebutnya sebagai talangan untuk Muktamar NU.

"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," ujar Fahd seusai pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).

KPK Panggil Bos Anak Usaha Intiland dalam Pengembangan Kasus Korupsi Bea Cukai

Meski menyebut adanya nama petinggi yang dibawa dalam permintaan uang tersebut, Fahd tidak mengungkap identitas pihak yang dimaksud.

Klaim Fahd mengenai pemberian uang untuk Muktamar NU merupakan keterangannya sebagai tersangka. Belum ada penjelasan dari KPK dalam bahan keterangan tersebut yang memastikan aliran maupun penggunaan dana Rp70 miliar sebagaimana diklaim Fahd.

Berawal dari OTT Kasus Lahan Summarecon

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Fahd bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Selain Fahd dan mantan Bupati Kebumen berinisial AS, tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Viral Kasus Tenun Tonic: Polisi Ungkap Laporan 96 Korban hingga Kerugian Rp1,9 Miliar

Oleh Van · 17 Nov, 14.06 WIB

JAKARTA — Kasus dugaan penipuan melalui aplikasi Tenun Tonic menjadi perhatian setelah puluhan orang melaporkan kerugian akibat tawaran pekerjaan merajut syal dari rumah atau work from home (WFH).

Para korban mengaku tergiur iming-iming mendapatkan penghasilan dari hasil pekerjaan merajut, tetapi justru diminta menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit.

Kasus tersebut pun telah masuk ke dalam laporan Polda Metro Jaya secara kolektif dengan nomor LP/B/8754/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Benar, Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan melalui aplikasi investasi Tenun Tonic,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto kepada awak media pada Selasa, 17 November 2026.

Budi membeberkan bahwa laporan yang masuk ke pihaknya dibuat oleh seorang berinisial RW (25) bersama dengan 95 orang lainnya pada Senin, 16 November 2026.

Kronologi Dugaan Penipuan Tenun Tonic

Berdasarkan informasi yang beredar dari para korban, kasus Tenun Tonic bermula dari tawaran pekerjaan merajut syal yang dipromosikan melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Threads.

Pekerjaan tersebut ditawarkan dengan sistem WFH, di mana pekerja dijanjikan memperoleh bayaran setelah menyelesaikan produk rajutan yang nantinya diklaim akan dibeli kembali oleh pihak pengelola.

Namun, sebelum mulai bekerja, peserta diminta menyetorkan deposit dengan nominal mulai sekitar Rp865 ribu hingga jutaan rupiah.

Besaran deposit disebut memengaruhi tingkat komisi yang bisa diperoleh peserta.

Selain itu, beredar informasi bahwa peserta ditawarkan bonus sekitar 10 persen apabila berhasil mengajak orang lain bergabung.

Seiring berjalannya waktu, sejumlah peserta mengaku mengalami kesulitan mendapatkan kembali uang yang telah disetorkan.

Para korban kemudian mendatangi lokasi usaha Tenun Tonic di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, untuk meminta kejelasan.

Polisi Catat Kerugian Rp1,9 Miliar

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Muncul Dugaan Liar Jika Penyadapan Melengserkan Prabowo: Listyo atau Tito yang Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.33 WIB



BANDA ACEH - Pegiat Politik, sosial, dan ekonomi, Arif Wicaksono, menyinggung pihak yang paling memperoleh manfaat besar jika isu penyadapan ilegal berhasil melengserkan Presiden Prabowo Subianto.Menurut Arif, jika skenario tersebut terjadi, maka berdasarkan konstitusi Gibran Rakabuming Raka akan menjadi presiden. Sementara itu, posisi wakil presiden berpotensi diisi oleh mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Siapa yang diuntungkan kalau isu penyadapan sampai melengserkan Prabowo? Jika skenarionya Prabowo lengser, secara konstitusi Gibran resmi naik jadi RI 1," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (18/11).

"Kursi RI 2? Bisa diisi Listyo Sigit atau Tito. Dugaan liar ini ada di pikiran publik," lanjutnya.

Sebagai informasi, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (jenderal) Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).

Kasus tersebut memasuki babak baru setelah perkara dugaan makar resmi dinaikkan ke tahap penyidikan pada Selasa (17/11/2026).

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami unsur tindak pidana makar sebagai pengembangan dari kasus akses ilegal dan pemusnahan alat bukti elektronik.

Hingga 17 November 2026, penyidik masih mengumpulkan alat bukti berupa perangkat elektronik dan memeriksa saksi sehingga belum menetapkan tersangka baru untuk pasal makar.

OTOMOTIF

Modifikasi Toyota Land Cruiser 300 Diubah Arctic Trucks, Kaki-kaki Dibuat Lebih Tangguh

Oleh Van · 17 Nov, 21.57 WIB

JAKARTA — Toyota Land Cruiser 300 dikenal sebagai SUV besar dengan kemampuan menjelajah berbagai medan. Namun, bagi Arctic Trucks, kemampuan standar kendaraan tersebut masih bisa dikembangkan lebih jauh.

Perusahaan modifikasi asal Islandia itu menghadirkan paket AT35 yang membuat Land Cruiser 300 memiliki karakter lebih siap menghadapi medan berat.

Modifikasi ini bukan sekadar mengubah tampilan agar terlihat lebih kekar. Arctic Trucks melakukan sejumlah penyesuaian pada bagian kaki-kaki, dimensi roda, hingga komponen pendukung lainnya.

Tujuannya meningkatkan kemampuan kendaraan ketika harus melintasi permukaan tanah tidak rata, pasir, bebatuan, maupun jalur berlumpur.

Dalam brosur resmi pengembangan LC300 AT35, Arctic Trucks menjelaskan bahwa penggunaan ban berukuran 35 inci memberikan keuntungan ketika kendaraan melintasi medan sulit. Salah satunya berkaitan dengan distribusi tekanan kendaraan terhadap permukaan tanah.

"Dengan tekanan ban yang disesuaikan, bidang kontak ban dapat menjadi lebih luas sehingga membantu kendaraan bergerak di permukaan lunak seperti pasir." Tulis Arctic Trucks dalam situs resminya yang dilihat Selasa (17/11/2026).

Perubahan paling mencolok terlihat pada penggunaan ban all-terrain berukuran 35 inci yang dipadukan dengan pelek 17 inci. Ukuran tersebut membutuhkan penyesuaian pada bagian rumah roda serta pemasangan fender tambahan agar ban memiliki ruang gerak yang memadai.

Arctic Trucks juga melakukan peningkatan pada sistem suspensi. Perubahan mencakup penggunaan pegas dan peredam kejut yang disesuaikan dengan karakter ban lebih besar.

Suspensi tersebut dirancang untuk meningkatkan jarak terendah kendaraan dari permukaan tanah sekaligus membantu menjaga artikulasi roda ketika melintasi jalur tidak rata.

Berdasarkan spesifikasi pengembangan LC300 AT35, peningkatan ground clearance mencapai sekitar 40 milimeter.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rismon Sianipar Tolak Dasco Jadi Pengganti Gibran: Biarkan Kursi Wapres Kosong Saja!

Oleh Redaksi · 18 Nov, 13.59 WIB



BANDA ACEH - Rismon Hasiholan Sianipar menolak wacana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.Loyalis Gibran tersebut menilai Dasco tidak memiliki mandat elektoral dari rakyat untuk menduduki jabatan wakil presiden.

Rismon menyampaikan pandangannya dengan menanggapi munculnya dukungan terhadap Dasco sebagai calon pengganti Gibran. Ia mempertanyakan klaim bahwa dukungan tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat.

"Sudah banyak sekali seolah-olah suara rakyat yang menginginkan Sufmi Dasco Ahmad ini menggantikan Wapres Gibran. Bahwa dia mendapatkan legitimasi suara rakyat. Banyak yang membawa banner, bawa apa segala macam. Pret ya kalau saya bilang. Itu bisa jadi dibayar, bisa jadi tidak organik," ujar Rismon dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11).

Ia menegaskan penolakannya terhadap Dasco karena masyarakat tidak memilih Ketua Harian Partai Gerindra tersebut sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Menurut Rismon, rakyat memberikan mandat kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, ia meminta agar Prabowo menghormati pilihan pemilih dan tidak mengganti konfigurasi pasangan tersebut melalui kesepakatan elite Politik.

"Biarkan kursi wakil presiden kosong, Pak Prabowo Subianto, sebagai penghargaan terhadap suara rakyat yang memilih Anda. Prabowo-Gibran kemarin. Hargailah suara rakyat," katanya.

Rismon Kritik Wacana Pengganti Wapres Lewat Kesepakatan Elite

Rismon juga mempersoalkan apabila penentuan wapres pengganti dilakukan berdasarkan kesepakatan antarelite atau kepentingan partai politik.

Ia menilai rakyat tidak pernah memberikan suara untuk pasangan Prabowo-Dasco maupun Prabowo dengan tokoh lain yang kini disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Gibran.

"Mengubah konfigurasi kepemimpinan nasional tanpa landasan konstitusional yang kuat, apalagi tidak berdasarkan suara rakyat, adalah persoalan serius terhadap penghormatan mandat pemilih," ujarnya.

Rismon bahkan menyebut pemilu ulang sebagai salah satu cara untuk mengetahui pilihan rakyat apabila konfigurasi pasangan yang memperoleh mandat dalam Pilpres 2024 berubah.

Ia juga berpendapat bahwa posisi wakil presiden yang kosong tidak akan menghambat jalannya pemerintahan Prabowo. Menurutnya, presiden masih dapat menjalankan pemerintahan bersama para menteri koordinator.

Rismon Ingatkan Potensi Penolakan terhadap Wapres Pengganti

Alasan lain yang disampaikan Rismon adalah potensi munculnya penolakan masyarakat apabila wakil presiden pengganti ditetapkan tanpa dasar legitimasi yang menurutnya kuat.

Ia mengingatkan kemungkinan munculnya konflik horizontal jika sosok yang menggantikan Gibran dianggap mengambil alih mandat politik yang diberikan pemilih kepada pasangan Prabowo-Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dana Bencana BNPB Diduga Jadi Bancakan Proyek, KPK Bongkar 3 Modus!

Oleh Van · 18 Nov, 16.48 WIB



Seorang profesional memberikan penjelasan mendalam dalam sebuah sesi wawancara.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Modus tersebut mulai dari peminjaman bendera perusahaan, pemberian fee kepada oknum pejabat BNPB, hingga dugaan penggelembungan harga atau mark-up pengadaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan resminya pada Selasa (17/11/2026), mengatakan sejumlah perusahaan diduga menggunakan nama perusahaan lain untuk memperoleh proyek. Namun, pekerjaan tersebut justru dikerjakan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.

"Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan)," ujar Budi.

Selain itu, KPK menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek dengan komitmen memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB.

Penyidik juga mendalami dugaan mark-up harga pengadaan barang dan jasa. KPK menduga kenaikan harga tersebut berkaitan dengan pemberian kickback kepada pihak tertentu.

KPK Periksa Eks Kepala BNPB

Dalam perkembangan penyidikan, KPK bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Kamis pekan sebelumnya.

Budi menjelaskan, Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan juga melibatkan seorang deputi BNPB yang masih aktif sebagai anggota TNI serta salah satu koordinator keprotokolan.

Para saksi dimintai keterangan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung vendor atau penyedia proyek.

KPK menduga terdapat benturan kepentingan dalam penunjukan sejumlah pelaksana proyek tersebut.

Adik Eks Kepala BNPB Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka.

KPK menduga Bima turut terlibat dalam proses pengadaan yang dilakukan BNPB. Penyidik masih menelusuri aliran uang serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari proyek tersebut.

KPK memastikan koordinasi dengan Puspom TNI terus dilakukan untuk mendukung proses penyidikan dan pemeriksaan saksi.(*)

LAPANGAN PEKERJAAN

Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA Bisa Ikut Daftar!

Oleh Van · 17 Nov, 18.18 WIB

JAKARTA — Formasi CPNS Kemenkeu 2026 disiapkan sebanyak 1.915 posisi untuk pelamar umum, termasuk lulusan SMA/SMK, D3, dan S1.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, pada Selasa, 17 November 2026.

Kesempatan rekrutmen ini tidak hanya ditujukan bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), tetapi juga terbuka bagi pelamar dari jalur umum.

Formasi CPNS Kemenkeu 2026 untuk Berbagai Jenjang

Deni menjelaskan bahwa formasi yang disiapkan tersebar di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan.

Lulusan baru atau fresh graduate juga dapat mengikuti seleksi selama memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan jabatan yang ditentukan.

Jenjang pendidikan yang disebutkan mencakup SMA/SMK, Diploma III (D3), hingga Sarjana (S1).

Dengan demikian, peluang mengikuti rekrutmen Kemenkeu tidak terbatas pada lulusan perguruan tinggi kedinasan.

Meski jumlah formasi telah disampaikan, rincian pembagian posisi berdasarkan jabatan, unit kerja, dan kualifikasi pendidikan belum dipaparkan secara lengkap.

Pendaftaran CPNS Melalui Portal SSCASN

Pendaftaran CPNS secara nasional menggunakan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Calon pelamar dapat mengakses portal resmi melalui alamat sscasn.bkn.go.id untuk memperoleh informasi dan mengikuti tahapan pendaftaran sesuai pengumuman resmi.

Sementara itu, informasi khusus mengenai rekrutmen pegawai Kementerian Keuangan dapat dipantau melalui situs rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Pelamar perlu memperhatikan pengumuman resmi untuk mengetahui jadwal, persyaratan administrasi, pilihan jabatan, serta dokumen yang harus disiapkan.

Kementerian Keuangan menerapkan prinsip rekrutmen yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel dalam proses seleksi pegawainya.

Karena itu, calon peserta sebaiknya tidak mengandalkan informasi dari tautan tidak resmi atau pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. (*)

EKONOMI

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.41 WIB



BANDA ACEH -Polemik terkait wacana relokasi atau pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, makin memanas.

Pengamat kebijakan publik Felix Martuah Purba mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar tidak menjadikan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Kota Sabang Sampaikan Rancangan Qanun APBK 2027 dalam Rapat Paripurna DPRK

Oleh Redaksi · 17 Nov, 18.16 WIB

SABANG – Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyampaikan Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRK Sabang, Selasa (17/11/2026).

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Sabang Magdalaina, unsur pimpinan dan anggota DPRK Sabang, para staf ahli, asisten, kepala OPD, kepala sekretariat lembaga keistimewaan, camat, serta para kepala bagian di lingkungan Setda Kota Sabang.

Dalam pidato pengantarnya, Zulkifli menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Qanun APBK 2027 telah melalui sejumlah tahapan perencanaan dan kesepakatan antara Pemerintah Kota Sabang dan DPRK Sabang, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Ia menegaskan bahwa pembahasan rancangan qanun tersebut membutuhkan keseriusan dan kerja sama seluruh pihak agar dapat menghasilkan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.

Zulkifli berharap berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat, mempercepat …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tak Cukup Mundur, Mahfud: Pencalonan Gibran Langgar Konstitusi, Penyelesaiannya Harus Lewat Hukum!

Oleh Redaksi · 18 Nov, 13.55 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden merupakan pelanggaran konstitusi dan hukum. Menurutnya, persoalan tersebut pada akhirnya diselesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi.Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026). Ia menanggapi pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden dengan mengaitkannya pada proses pencalonan Gibran dua tahun sebelumnya.

"Kasus Gibran mulai pencalonan sebagai wapres sampai dia harus mundur atau jatuh sebagai wapres itu merupakan dua peristiwa sebab akibat," kata Mahfud.

Mahfud menyebut persoalan pencalonan Gibran sudah bermasalah sejak awal. Ia menilai proses tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan hukum yang dilakukan melalui rekayasa.

"Pertama, pencalonan Gibran itu adalah satu pelanggaran konstitusi dan hukum melalui akal-akalan," ujarnya.

Menurut Mahfud, dugaan pelanggaran dalam proses tersebut juga telah dibuktikan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia menyebut putusan itu mengungkap adanya rekayasa dan pelanggaran berat.

Mahfud kemudian menjelaskan proses perkara uji materi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia, sejumlah gugatan dengan materi serupa sebelumnya hampir diputus dengan hasil ditolak.

Saat itu, Anwar Usman tidak ikut memutus perkara dengan alasan konflik kepentingan karena Gibran merupakan keponakannya. Namun, setelah diketahui gugatan tersebut akan ditolak, pemohonnya mencabut permohonan sehingga perkara kehilangan objek.

Beberapa hari kemudian, permohonan serupa kembali diajukan oleh pemohon lain, tepatnya pada hari libur. Mahfud mengatakan perkara tersebut langsung diputus tanpa sidang terbuka. Komposisi hakim saat itu terdiri atas empat hakim, tiga hakim, dan dua hakim, dengan lima hakim akhirnya memenangkan permohonan tersebut.

Meski mengkritik proses yang melatarbelakangi putusan tersebut, Mahfud menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap harus dipatuhi.

"Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar, kalau MK sudah memutus, meskipun salah, harus ikut," kata Mahfud. "Maka kita ikut semua putusan yang salah itu karena ikut Undang-Undang Dasar."

Namun, menurut Mahfud, kepatuhan terhadap putusan MK tidak berarti pihak yang melakukan pelanggaran terbebas dari konsekuensi hukum. Ia mengatakan konstitusi juga menyediakan mekanisme untuk menindak hakim yang terbukti melanggar aturan.

"Tetapi Undang-Undang Dasar juga dan hukum memberi jalan hakimnya harus dihukum," ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Geng Solo Masih Kuasai Kejagung: Silfester Matutina tak Kunjung Dieksekusi

Oleh Redaksi · 18 Nov, 16.16 WIB



BANDA ACEH - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf menyebut, terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Silfester Matutina sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menunda pelaksanaan eksekusi, penjarakan segera bos relawan Jokowi itu."Kasus Silfester itu sudah putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan ini kewenangan Kejaksaan (Kejaksaan Agung). Saya tidak merasa aneh apabila pimpinan Kejaksaan diduga masih berafiliasi dengan kekuatan lama yang 'membekingi' Silfester. Karena itu seakan yang bersangkutan sulit dieksekusi," jelas Hudi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, perbuatan para jaksa yang menunda-nunda eksekusi terhadap Silfester ini, dapat dituntut secara hukum. Karena menghalangi proses hukum.

Tak hanya itu, Hudi menilai fakta belum dibuinya Silfester, membuktikan Kejaksaan masih dalam lingkaran kekuatan lama. "Karena itu, saya berharap Prabowo memotong lingkaran ini tanpa ada tawar-menawar dalam penegakan hukum, sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.

Dia mendesak Presiden Prabowo untuk dapat segera memutus lingkar hubungan kejaksaan dengan kekuasaan lama, agar kasus-kasus yang mandek dapat segera terselesaikan.

"Menurut saya mungkin saja dengan mengganti orang-orang yang terlibat dengan kekuasaan lama (di Kejaksaan Agung), sehingga Prabowo harus bersihkan instansi ini," tandas Hudi.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) Silfester Matutina sejak 2019. Namun, hingga September 2026, terpidana kasus fitnah terhadap Jusuf Kalla itu belum juga masuk penjara.

Putusan pidananya sudah berkekuatan hukum tetap. Yang belum jelas justru alasan jaksa tak kunjung menjalankan eksekusi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) belum memberikan jawaban mengenai penyebabnya. Korps Adhyaksa hanya menyatakan pelaksanaan putusan berada di tangan jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

ACEH

Cegah Pergeseran Tradisi, Pemkab Aceh Barat Perkuat Aturan Adat Perkawinan

Oleh Biro Meulaboh · 17 Nov, 15.50 WIB

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Upacara Adat Perkawinan guna menjaga keaslian tradisi serta memastikan setiap prosesi perkawinan berjalan sesuai ketentuan adat Aceh.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Ruswaidi, S.STP., M.Si., di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Selasa (17/11/26).

Dalam sambutannya, Ruswaidi mengatakan adat perkawinan merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Aceh Barat. Di dalamnya terkandung nilai kekeluargaan, kebersamaan, tata krama, serta penghormatan terhadap tradisi leluhur.

Menurutnya, Perbup Nomor 24 Tahun 2026 hadir sebagai pedoman agar pelaksanaan adat perkawinan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ia mencontohkan adanya praktik dalam prosesi pertunangan yang perlu diluruskan, seperti pemasangan cincin yang dilakukan langsung oleh calon mempelai pria (linto).

"Melalui peraturan ini, kita ingin setiap prosesi adat dilaksanakan sesuai tata cara dan ketentuan adat Aceh. Jangan sampai terjadi pergeseran yang menghilangkan nilai-nilai tradisi," ujarnya.

Ruswaidi juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan, termasuk pembawa acara (MC), penyedia pelaminan, dan jasa katering, memahami serta mendukung pelestarian adat perkawinan khas Aceh Barat.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki praktik adat yang selama ini belum sesuai dengan ketentuan.

"Peraturan bupati ini harus menjadi acuan bersama agar ada keselarasan antara adat yang diterapkan keluarga, prosesi yang dipandu MC, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan," katanya.

Ruswaidi menegaskan, pelestarian adat perkawinan juga harus tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Karena itu, ia meminta informasi mengenai Perbup tersebut terus disebarluaskan agar dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Aceh Barat.[]

Editorial: Biro Meulaboh.

OPINI

Perang Politik Prabowo-Jokowi

Oleh Redaksi · 17 Nov, 20.13 WIB

Oleh: Lukas Luwarso

AO Zedong dalam On Protracted War (1938) bilang: "Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed" (Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah).

Politik adalah bagaimana meraih kekuasaan, pengaruh, sumber daya, dan legitimasi. Dalam politik, senjata yang digunakan bukan bedil dan meriam, melainkan koalisi, institusi, hukum, dan opini publik.

Relasi Prabowo-Jokowi adalah dua kekuatan politik yang pernah bersekutu, tetapi kini perang kepentingan. Mundurnya Gibran dari kursi wapres dan soal penyadapan adalah babak penting dalam "perang" ini.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

BBPOM Aceh dan PPMHKP Perkuat Pengawasan Pangan Ikan untuk Program MBG

Oleh Redaksi · 17 Nov, 17.59 WIB

BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) bersama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Banda Aceh memperkuat kolaborasi dalam menjamin mutu dan keamanan pangan asal ikan guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkualitas di Provinsi Aceh.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan Asal Ikan yang berlangsung pada Senin (16/11/2026) dan diikuti oleh seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahan pangan yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga terjamin mutu dan keamanannya. Terlebih, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat dan menjadi pilihan bahan pangan bergizi bagi penerima manfaat program, khususnya anak-anak.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Tim Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BBPOM Aceh, Suryani Fauzi, menyampaikan bahwa ikan memiliki kandungan protein berkualitas dan kaya akan asam lemak Omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun, karakteristik ikan yang mudah mengalami penurunan mutu menjadikan penanganan dan penyimpanannya harus mendapat perhatian khusus.

Beberapa potensi bahaya yang perlu diwaspadai antara lain pembentukan histamin, cemaran bakteri patogen, penggunaan bahan berbahaya, serta kontaminasi yang dapat terjadi selama proses penanganan dan pengolahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud MD: Kasus Gibran dari Pencalonan hingga Mundur Jadi Dua Peristiwa Sebab-Akibat

Oleh Redaksi · 18 Nov, 12.53 WIB



BANDA ACEH -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Prof Mahfud MD mengajak masyarakat merefleksikan perjalanan politik dan hukum Gibran Rakabuming Raka, mulai dari proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 hingga pengunduran dirinya dari jabatan tersebut pada 12 November 2026.

Mahfud menilai dua peristiwa itu memiliki hubungan sebab-akibat. Menurutnya, persoalan yang muncul sejak pencalonan Gibran merupakan rangkaian permasalahan konstitusional dan hukum yang akhirnya kembali diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Ia berpendapat, pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak dapat dilepaskan dari kontroversi perubahan ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Kasus Gibran mulai pencalonan sebagai Wapres sampai dia harus mundur atau jatuh sebagai Wapres itu merupakan dua peristiwa sebab akibat,” kata Mahfud dalam keterangannya di podcast Terus Terang yang dikutip Holopis.com, Rabu (18/11/2026).

Mahfud menyebut proses pencalonan tersebut sebagai pelanggaran konstitusi dan hukum yang menurut penilaiannya terjadi melalui rekayasa aturan. Ia merujuk pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut seharusnya dipahami sebagai masalah hukum dan konstitusi, bukan semata-mata pertarungan politik antara kelompok yang mendukung dan menolak Gibran.

“Bayangin kita 2 tahun selalu berteriak bahwa itu salah tapi kan secara politik mereka menang, sehingga pada akhirnya Tuhan memberi jalan tumbangkan dulu Listyo dengan satu peristiwa lalu kasus ini bergulir sehingga tidak berdaya lagi pembelaan itu, habis,” ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan kembali kontroversi yang mengiringi lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya, sejumlah permohonan pengujian ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden telah diperiksa MK. Namun, menurut penjelasan Mahfud, terdapat perubahan dinamika perkara hingga akhirnya muncul putusan yang memberikan pengecualian persyaratan usia bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Mahfud menguraikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam perkara tersebut berlangsung dengan perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi. Ia menggambarkan adanya komposisi pendapat yang terpecah sebelum rumusan yang akhirnya disepakati menjadi dasar perubahan persyaratan pencalonan.

Persoalan itu kemudian diperiksa MKMK. Pada 7 November 2023, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Geledah Rumah Posko Eko Hadi Terkait Dugaan Makar

Oleh Redaksi · 18 Nov, 12.48 WIB



BANDA ACEH — Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Operasi itu dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada Selasa (17/11/2026) malam.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, membenarkan penggeledahan tersebut. Menurutnya, rumah di Cipete itu digunakan Eko Hadi sebagai posko.

"Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Namun, Susatyo belum memberikan hasil penggeledahan maupun barang bukti yang diamankan penyidik. Dia menyatakan perkembangan penyidikan kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana keamanan negara tersebut akan disampaikan secara resmi.

"Untuk perkembangan TP (tindak pidana) terhadap Kamneg (keamanan negara) - Makar akan disampaikan saat presscon lengkap," ujarnya.

Penggeledahan ini berlangsung setelah Polri meningkatkan penanganan dugaan makar ke tahap penyidikan. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), hingga pemusnahan alat bukti elektronik yang menyeret sejumlah mantan petinggi Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir sebelumnya menyatakan, Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mengusut pengembangan dugaan makar tersebut.

"Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Isir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Dalam perkembangan perkara, Prabowo memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada 4 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DIGITAL

47 Persen Korban Penipuan Digital Tertipu Berulang, Dampaknya Bikin Warga Tak Lagi Percaya Platform Online

Oleh Van · 17 Nov, 21.51 WIB

JAKARTA — Korban penipuan digital berulang di Indonesia mencapai 47 persen dalam setahun terakhir, berdasarkan laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA) 2026.

Laporan bertajuk State of Scams in Indonesia 2026 itu dipublikasikan pada Senin, 16 November 2026, dengan melibatkan 1.200 orang dewasa di Indonesia.

Temuannya menunjukkan penipuan digital tidak hanya mengancam kondisi keuangan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis masyarakat.

Hampir Separuh Korban Mengalami Penipuan Berulang

GASA mencatat 70 persen responden pernah menghadapi upaya penipuan dalam 12 bulan terakhir.

Dari kelompok tersebut, 35 persen mengaku pernah berinteraksi dengan pelaku, sementara 10 persen mengalami kehilangan uang atau data pribadi.

Sebanyak 47 persen korban juga mengaku mengalami penipuan berulang, sehingga ancaman tersebut tidak berhenti setelah satu kejadian.

Dampaknya turut dirasakan secara psikologis, dengan 76 persen korban menyatakan pengalaman penipuan memengaruhi kesejahteraan mental mereka.

Sebanyak 58 persen responden mengaku percaya diri mampu mengenali penipuan, tetapi temuan tersebut menunjukkan risiko tetap ada.

OJK Catat Ratusan Ribu Laporan Penipuan

Di Indonesia, penanganan penipuan transaksi keuangan dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikoordinasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam siaran pers pada 6 November 2026, OJK mencatat IASC menerima 737.686 laporan sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 28 Oktober 2026.

Sebanyak 743.589 rekening terkait penipuan telah diblokir, dengan dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp967,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp208,9 miliar telah dikembalikan kepada korban melalui rekening di 24 bank.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menyebut pengembalian dana korban sebagai bentuk perlindungan negara.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Karhutla di Kaltim Berlangsung hingga Subuh, Api Disebut Menyebar di Sejumlah Titik

Oleh Van · 17 Nov, 14.50 WIB

KALTIM — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di kawasan Bonles, Kalimantan Timur, sejak Senin sore hingga Selasa, 17 November 2026. Api disebut masih menyebar di beberapa titik hingga waktu subuh.

Informasi tersebut disampaikan akun Threads @puturmdn pada Selasa pagi. Dalam unggahannya, pemilik akun menyebut petugas masih berupaya memadamkan api di sejumlah lokasi.

“Mengabarkan dari KALTIM, sejak Senin sore hingga subuh tadi 05.14 WITA. Masih terjadi KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN di kawasan Bonles, di beberapa titik api masih menyebar dan para petugas masih berjibaku dengan api,” tulis akun tersebut.

Pemilik akun juga berharap kebakaran segera dapat dipadamkan. Namun, unggahan itu belum menyertakan keterangan mengenai luas area yang terbakar maupun lokasi administratif kawasan Bonles.

BPBD Kaltim Catat Sejumlah Kejadian Karhutla

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Fantastis! Polda Sumut Sita 30,34 Ton Narkotika Senilai Rp3,36 Triliun

Oleh Van · 18 Nov, 16.42 WIB



Polisi Narkotika berhasil melakukan penggerebekan dan mengamankan sejumlah tersangka di laut.

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengungkap 981 kasus narkotika dalam kurun waktu 46 hari.

Dari ratusan kasus tersebut, polisi menangkap 1.311 tersangka dan menyita barang bukti narkoba dengan total mencapai 30,34 ton.

Pengungkapan kasus narkoba tersebut berlangsung sejak 1 Oktober hingga 15 November 2026.

“Selain narkotika, kami juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp1,2 miliar dan menangkap tujuh tersangka yang diduga sebagai bandar,” ujar Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan dalam konferensi pers kepada awak media yang digelar pada Senin, 16 November 2026 lalu.

Rincian Barang Bukti Narkoba yang Disita Polda Sumut

Dalam pengungkapan selama 46 hari tersebut, Polda Sumut menyita berbagai jenis narkotika.

Barang bukti yang diamankan meliputi 172 kilogram sabu, 157 kilogram ganja, 150.012 batang pohon ganja, serta 30.510 butir pil ekstasi.

Polisi juga mengamankan 23.868 mililiter cairan yang mengandung narkotika.

Selain itu, petugas menyita uang tunai sebesar Rp1,2 miliar yang berkaitan dengan penanganan kasus narkotika.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut turut mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam sejumlah perkara.

Kapolda Sumut menyebutkan, penyitaan barang bukti tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 93.469.666 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba dengan nilai ekonomis barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp3,36 triliun.

Adapun dalam video yang diunggah di Instagram pribadi milik Sonny, penangkapan tak berlangsung dengan mudah karena polisi harus mengejar pelaku hingga ke tengah laut.

Kapolda Sumut Ajak Masyarakat Berantas Narkoba

Sonny menegaskan pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Menurutnya, peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Kami memahami narkoba bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga merupakan ancaman terhadap generasi muda, keamanan, kesehatan masyarakat, serta masa depan bangsa,” ujarnya.

Oleh karena itu, Polda Sumut mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar.

“Kami akan terus memberantas dan menyikat habis narkoba-narkoba di wilayah Sumatera Utara,” pungkasnya.(*)

NASIONAL

Rismon Tak Hadir Sidang Ijazah Jokowi, JPU Ganti Saksi hingga Kubu Roy Suryo Keberatan

Oleh Redaksi · 18 Nov, 12.44 WIB



BANDA ACEH - Sidang perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) diwarnai ketidakhadiran saksi Rismon Sianipar, Rabu (18/11/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengganti saksi dengan dua orang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga memicu keberatan tim kuasa hukum Roy Suryo.

JPU menyampaikan bahwa ahli digital forensik Rismon Sianipar tidak dapat hadir dalam persidangan ijazah Jokowi. Rismon meminta agar jadwal pemanggilannya diundur sehingga keterangannya dapat diberikan pada sidang berikutnya.

"Mohon izin Majelis, terkait dengan saksi yang hadir pada hari ini, sebagaimana rencana pembuktian disampaikan minggu lalu, Majelis, sebenarnya ada atas nama Adam dan Rismon. Tapi mohon izin Majelis dari yang bersangkutan bersurat kepada kami untuk dijadwalkan ulang pemanggilan hari ini," kata JPU di ruang sidang, Rabu (18/11/2026).

Meski Rismon tidak hadir, JPU tetap menghadirkan saksi lain agar agenda pembuktian berjalan. Dua saksi pengganti tersebut berasal dari KPU, yakni A Bagus Makawaru dan Binsar ST Siagian.

"Sebagaimana arah Majelis Hakim, kami tetap memperbanyak panggilan saksi hari ini, Majelis. Jadi akan dihadirkan juga dua orang saksi dari KPU yaitu atas nama A Bagus Makawaru dan atas nama Binsar ST Siagian," kata JPU.

Namun, pergantian saksi tersebut menuai keberatan dari tim kuasa hukum Roy Suryo. Mereka menilai JPU seharusnya lebih dahulu memberikan pemberitahuan terkait perubahan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, akhirnya menerima pergantian saksi tersebut. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya hanya memberikan toleransi untuk kali ini.

"Yang Mulia, bahwa ini adalah toleransi kami yang pertama dan terakhir. Jadi kalau seandainya nanti ada saksi baru tapi tidak diberitahukan sebelumnya, kami akan menolak," kata Refly.

Menanggapi keberatan tersebut, hakim Ketua Christina Endarwati menyepakati agar persidangan diskors sementara. Penundaan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum Roy Suryo mempersiapkan pertanyaan bagi dua saksi pengganti dari KPU.

"Kita sama-sama terima ya. Jadi kita skors sidang, kita mulai lagi nanti pukul 10.00. Demikian ya," kata hakim

LIFESTYLE

Berawal dari Fans, Tiara Andini Bersanding Bersama Iqbaal Ramadhan menjadi BA Momoyo

Oleh Redaksi · 17 Nov, 15.33 WIB

BANDA ACEH - Tiara Andini Resmi Bergabung Jadi Brand Ambassador Momoyo Bersama Iqbaal Ramadhan, Luncurkan White Peach Oolong Milktea di Hadapan 700+ Fans.

Momoyo, brand minuman segar favorit anak muda Indonesia, menggelar acara spesial Meet & Greet Momoyo bersama Iqbaal Ramadhan dan Tiara Andini di Summarecon Mall Serpong.

Acara yang dipandu oleh MC Dave Hendrik ini menjadi momen spesial untuk dua pengumuman besar: bergabungnya Tiara Andini sebagai Brand Ambassador terbaru Momoyo dan peluncuran produk terbaru White Peach Oolong Milktea.

Setelah sukses berkolaborasi dengan Iqbaal Ramadhan, Momoyo kini menghadirkan Tiara Andini untuk melengkapi energi baru brand yang lebih fresh, sweet, dan uplifting. Kolaborasi dua figur muda inspiratif ini diharapkan dapat semakin dekat dengan konsumen setia Momoyo, khususnya Gen Z dan Millennials. Antusiasme terlihat luar biasa, lebih dari 700 orang memadati area atrium Summarecon Mall Serpong untuk bertemu langsung dengan kedua idolanya. Acara dikemas secara interaktif melalui talkshow "Cerita Segar Bareng Iqbaal & Tiara", di mana keduanya berbagi cerita perjalanan menjadi bagian dari keluarga Momoyo dan kesan pertama mereka saat mencoba varian baru. Keseruan berlanjut dengan sesi Product Making Show, di mana Iqbaal dan Tiara meracik langsung White Peach Oolong Milktea dan membagikannya kepada fans beruntung, serta sesi foto bersama.

Varian White Peach Oolong Milktea menjadi bintang utama hari itu. Memadukan keharuman buah White Peach yang manis dan juicy, dengan karakter teh Oolong yang ringan, wangi, dan elegan, serta creamy milktea khas Momoyo yang lembut. Cocok untuk teman yang mencari kesegaran dengan rasa yang tidak terlalu berat.

"Aku excited banget resmi jadi bagian dari keluarga Momoyo. Dari dulu ngikutin Momoyo, sekarang bisa jadi BA bareng Iqbaal. Semoga teman-teman suka White Peach Oolong Milktea seperti aku," Tiara Andini, Brand Ambassador Momoyo

Perwakilan Momoyo menyampaikan bahwa peluncuran ini adalah komitmen untuk terus berinovasi.

"Kehadiran Tiara melengkapi semangat Momoyo. Kami percaya kolaborasi Iqbaal dan Tiara akan membawa warna baru. White Peach Oolong Milktea adalah jawaban kami atas tren rasa buah dan teh yang sedang digemari anak muda, tapi dengan sentuhan khas Momoyo yang creamy dan menyegarkan," ujar perwakilan Momoyo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Gus Ipul Siapkan 8 Hektare Lahan UI untuk Sekolah Rakyat, Ini Tahap Selanjutnya

Oleh Van · 17 Nov, 13.50 WIB

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan sekitar 8 hektare milik Universitas Indonesia (UI). Rencana tersebut dibahas bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Senin, 16 November 2026.

Gus Ipul mengatakan UI bersedia menyediakan lahan di sisi kampus yang masuk wilayah administratif DKI Jakarta. Dalam keterangannya, ia menyebut area tersebut merupakan bagian dari Hutan Kota UI.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.

Ia menyebut luas Hutan Kota UI lebih dari 100 hektare. Dari kawasan tersebut, pemerintah merencanakan pemanfaatan sekitar 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Dihujat Pandji hingga Windah Soal Kontrak Rp 14,69 M dari Pemerintah, Raffi Ahmad Ogah Mundur

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.33 WIB

BANDA ACEH – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, belum menunjukkan keinginan untuk meninggalkan jabatan yang dipercayakan kepadanya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah gelombang kritik dan desakan mundur akibat sejumlah polemik, Raffi justru meminta publik memberinya kesempatan untuk terus membuktikan diri.

Ia menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait kelanjutan tugasnya di pemerintahan.

Menariknya, Raffi juga menyebut sejumlah figur publik yang selama ini melontarkan kritik terhadap dirinya.

Mulai dari komika Pandji Pragiwaksono, streamer Windah Basudara, Bintang Emon, Jerome Polin, hingga Andovi dan Abdur.

Alih-alih menganggap kritik tersebut sebagai serangan pribadi, Raffi mengaku menerimanya sebagai bentuk perhatian yang harus dijadikan bahan evaluasi.

"Ya yang mengkritik pun saya mengucapkan terima kasih, itu adalah bentuk perhatian meskipun ekspresinya berbeda-beda," ujar Raffi dalam konferensi pers di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Ia bahkan menyampaikan apresiasi secara langsung kepada para figur publik yang telah menyuarakan kritik melalui media sosial.

"Terima kasih buat Mas Pandji, buat Windah Basudara, Andovi, Abdur, Bintang Emon, Jerome …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ucapan Gibran Sebelum Mundur Dicurigai, ‘Jangan Sampai Bapak …, Saya saja Mundur’

Oleh Redaksi · 18 Nov, 13.35 WIB



BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menanggapi kutipan yang beredar dan diduga berasal dari mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Kutipan tersebut berbunyi, "Jangan sampai Bapak. Saya saja mundur". Kalimat itu dicurigai disampaikan Gibran sebelum resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Denny mengatakan, berdasarkan informasi yang didengarnya, sempat terjadi pertemuan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan tersebut diduga dipicu oleh adanya orang dekat Jokowi yang mulai dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting.

"Jadi ada informasi, ada pertemuan keluarga, kemudian di situ muncul ada orang dekatnya Pak Jokowi yang sudah mulai dipanggil untuk penyadapan," ujar Denny dalam kanal YouTube Refly Harun, dikutip Selasa (17/11).

"Orang dekat Pak Jokowi dipanggil yang sudah mulai diminta untuk untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Nah, jadi dipanggil saya cek ke sini, saya cek ke sini. Oh, dipanggil. Saya enggak bilang ajudan ya. Pokoknya orang dekatnya Pak Jokowi.," lanjutnya.

Denny kemudian mengaitkan informasi tersebut dengan munculnya pernyataan, "Ya sudah, saya mundur saja kalau begitu"

Ia menduga, kalimat "Jangan sampai Bapak" merujuk pada kekhawatiran agar kasus penyadapan tersebut tidak menyeret Jokowi.

"Kasus penyadapan ini jangan sampai menjeret menjerat Pak Jokowi. Kalau sudah orang dekat ini diperiksa he itu sudah meng bisa jadi pintu masuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut disebut mengakhiri masa jabatannya setelah sekitar dua tahun 23 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Sementara itu, dalam kasus dugaan penyadapan, Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi.

ACEH

Buka Musda VI MPU, Wawako Sabang Ajak Perkuat Sinergi Ulama dan Pemerintah

Oleh Redaksi · 17 Nov, 16.58 WIB

SABANG – Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Suradji saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang Tahun 2026, yang turut dihadiri Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk. Muhammad Hatta, unsur Forkopimda serta sejumlah undangan lainnya, di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, MPU memiliki kedudukan strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan masukan terhadap berbagai kebijakan daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

“Ulama dan umara harus berjalan seiring, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus terjaga, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam,” kata Suradji.

Ia juga menyoroti pentingnya peran MPU dalam memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan di Kota Sabang, khususnya sektor pariwisata dan olahraga, agar tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Aceh, Sabang diharapkan mampu menerapkan kearifan lokal yang menjunjung nilai-nilai keislaman, sekaligus memastikan penyelenggaraan kegiatan olahraga tetap memperhatikan norma dan ketentuan syariat.

“Sabang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Aceh. Karena itu, kita berharap setiap kegiatan pariwisata maupun olahraga tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Di sinilah peran MPU untuk memberikan masukan dan mengingatkan pemerintah, sehingga penerapan syariat Islam dapat berjalan secara menyeluruh,” tegas Suradji.

Sementara itu, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk. Muhammad Hatta, dalam arahannya menekankan bahwa ulama yang tergabung dalam lembaga MPU memiliki peran penting sebagai mitra sejajar pemerintah dalam mengawal kebijakan daerah. Keberadaan MPU yang memiliki landasan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan qanun kekhususan Aceh diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memastikan kebijakan pemerintahan dan pembangunan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam.

“Maka di sinilah peran ulama sangat penting dan kami sangat mengharapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota dan semua jajarannya agar bisa terus menjadikan MPU Kota Sabang khususnya sebagai mitra dalam berkomunikasi dan tentunya dalam mengambil ide-ide untuk melahirkan kebijakan-kebijakan di dalam menjalankan pemerintahan di Kota Sabang secara khusus,” ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ketum MUI Nilai Dasco Cocok Jadi Wapres Pendamping Prabowo

Oleh Van · 18 Nov, 21.32 WIB



JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya sebagai wakil presiden RI. Anwar Isakandar menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad cocok untuk posisi tersebut.

"Saya Muhammad Anwar Iskandar, ketika ditanya siapa yang paling cocok untuk mengisi wakil presiden yang kosong, saya pikir butuh orang yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Anwar Iskandar mengawali pendapatnya, Rabu (18/11/2026).

Anwar mengatakan Wapres RI nantinya harus mampu melaksanakan program-program utama untuk membangun negara. Ia memandang dibutuhkan figur yang mampu memberikan masukan kepada presiden.

"Selanjutnya juga mampu untuk membantu presiden dalam melaksanakan program-program utama untuk membangun negara menuju Indonesia mandiri. Dan tentu dibutuhkan juga figur yang mampu untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden dalam ruang khusus yang dibutuhkan," ucap dia.

Anwar lantas mengatakan jika sosok tesebut ada pada diri Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia mendoakan Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan terhadap Prabowo dan Dacso.

"Dan untuk itu saya pikir Profesor Sufmi Dasco Ahmad adalah orang yang cocok untuk itu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan rida-Nya kepada Pak Prabowo dan Pak Dasco. Amin ya rabbal alamin," imbuhnya.(*)

NASIONAL

Dasco Anggap Dukungan Wapres Hanya Dinamika: Mari Hormati Keputusan Presiden!

Oleh Redaksi · 18 Nov, 18.35 WIB



BANDA ACEH -Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai dukungan calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ramai terhadap dirinya hanya sekadar dinamika.

“Soal tadi yang disampaikan soal dukung-mendukung dan lain-lain itu adalah dinamika,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Atas dasar itu, Dasco menegaskan bahwa persoalan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

“Marilah kita sama-sama menghormati apa yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden kita sesuai dengan undang-undang yang ada dan mekanisme yang berlaku di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia,” jelas Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Dasco kembali menegaskan bahwa hal yang berkaitan dengan Wapres pengganti Gibran adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo.

“Saya sampaikan bahwa sekali lagi, hak dalam pengusulan calon wakil presiden itu yang diatur dengan undang-undang adalah hak penuh daripada Bapak Presiden,” pungkasnya.

NASIONAL

Aliansi 40 Ormas Islam Apresiasi Penetapan Listyo Sigit sebagai Tersangka Kasus Penyadapan

Oleh Redaksi · 18 Nov, 09.02 WIB



BANDA ACEH -Aliansi 40 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua LBH DPP Hidayatullah sekaligus Juru Bicara Aliansi 40 Ormas Islam, Syaefullah Hamid. Ia menilai penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka menunjukkan keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut perkara tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Saya rasa ini patut diapresiasi oleh kita dan seluruh masyarakat, keberanian menetapkan Ex Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan, membuktikan harapan Polisi Bersama Masyarakat dapat terwujud,” ujar Syaefullah Hamid kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Syaefullah, langkah tersebut menjadi momentum untuk membuktikan bahwa penegakan hukum di tubuh Polri dapat berjalan secara profesional dan tidak tebang pilih.

Apresiasi serupa disampaikan Aktivis Syarikat Islam sekaligus Juru Bicara Aliansi 40 Ormas Islam, Gurun Arisastra. Ia menilai penanganan perkara yang turut menyeret mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu harus dikawal sampai seluruh rangkaian peristiwa terungkap.

“Ini luar biasa, bukti penegakan hukum tidak pandang bulu, harus diapresiasi, namun hasil penyadapan dari LSP disampaikan kepada siapa? Listyo melaporkan setiap informasi hasil penyadapan ini perlu diungkap, diusut tuntas, kita dukung kasus ini untuk diungkap secara tuntas,” ujar Gurun.

Mantan Ketua bidang Hukum dan HAM PB SEMMI ini pun menyoroti pentingnya mengungkap pihak-pihak yang diduga menerima hasil penyadapan. Menurutnya, penyidikan tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga harus menjelaskan alur perintah, penggunaan informasi, serta pihak yang diduga memperoleh hasil penyadapan tersebut.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Publik LBH AP PP Muhammadiyah, Gufroni, juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Suyudi dalam mengusut perkara tersebut.

“Tentu kita harus apresiasi langkah Kapolri Suyudi berani tetapkan Ex Kapolri Listyo sebagai Tersangka Penyadapan, ini luar biasa, bahkan kita mendukung ini diusut sampai jelas siapa dalangnya, siapa yang atur Listyo Sigit, diperintahkan oleh siapa, ini harus terus diungkap, kita dukung diusut secara tuntas,” tutup Gufroni.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya diungkap Bareskrim Polri. Penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dicecar Refly Harun, Saksi KPU Yakini Ijazah Jokowi Asli saat Daftar Pilgub DKI Jakarta

Oleh Redaksi · 18 Nov, 13.03 WIB



BANDA ACEH - Mantan Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar ST Siagian, meyakini ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang digunakan sebagai syarat pendaftaran calon gubernur pada Pilgub DKI Jakarta 2012.

Namun, keyakinan tersebut dipertanyakan kuasa hukum terdakwa Roy Suryo, Refly Harun, dalam persidangan perkara ijazah Jokowi.

Awalnya, Refly menanyakan keyakinan saksi Binsar mengenai keaslian ijazah Jokowi. Binsar mengaku percaya dokumen tersebut asli karena institusi tempatnya bekerja, yakni KPU, menyatakan ijazah tersebut asli.

"Nah, saya tanya Anda, sebagai saksi, Anda juga yakin itu asli," ujar Refly dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim)

"Ya karena institusi tempat saya bekerja menyatakan asli, Pak," kata Binsar.

"Oke. Karena KPU bilang asli, Anda bilang asli," ucap Refly.

"Ya, ikut," ujar Binsar.

Refly kemudian mempertanyakan dasar KPU maupun Binsar menyatakan ijazah Jokowi asli. Dia menyoroti proses verifikasi yang dinilai tidak dilakukan secara detail terhadap dokumen tersebut.

"Oke, pertanyaan saya adalah apa dasar KPU atau dasar Anda untuk mengatakan bahwa itu asli sementara tidak dilakukan verifikasi secara detail? Artinya, pertanggungjawaban kerja ilmiahnya seperti apa, Saudara Saksi," kata Refly.

Hukum Roy Suryo Sebut Ijazah Jokowi Berbeda dengan Dokumen 15 Desember

Menanggapi pertanyaan tersebut, Binsar menjelaskan bahwa verifikasi awal dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Sementara itu, pemeriksaan lanjutan dilakukan apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dalam dokumen.

"Ya. verifikasi persyaratan, itu yang pertama kan ada tidak ada. Kemudian dilakukan apa? verifikasi lanjutan yang saya tidak tahu persis apakah elemen-elemennya dan ketentuan mengatakan bahwa jika ada keganjilan atau dugaan ketidakbenaran, maka dilakukan klarifikasi," kata Binsar.

Dalam persidangan tersebut, Refly juga menanyakan apakah Binsar pernah membaca atau melihat buku karya Bonatua Silalahi berjudul "Ijazah Jokowi Tidak Ada".

Binsar menjawab bahwa dirinya tidak pernah membaca maupun melihat buku tersebut

EDUKASI

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Ungkap Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.24 WIB

BANDA ACEH - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan banyak anggota dewan yang merupakan lulusan pendidikan kesetaraan Paket C. Informasi tersebut diperolehnya dari pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) saat melakukan kunjungan ke Majalengka, Jawa Barat.Mu’ti menceritakan, salah satu PKBM yang dikunjunginya memiliki lebih dari 300 peserta didik. Dari jumlah tersebut, peserta program pendidikan kesetaraan Paket C menjadi kelompok terbanyak.

“Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ujar Mu’ti sambil tertawa dalam rapat bersama anggota DPR RI, Senin (16/11/2026).

Menurut Mu’ti, tingginya jumlah peserta pendidikan kesetaraan menunjukkan pentingnya keberadaan PKBM dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh jalur sekolah formal.

Terlebih, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi persoalan. Penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan kondisi geografis.

Mu’ti menjelaskan, sejumlah anak tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai kendala. Faktor kultural, seperti pernikahan pada usia muda, menjadi salah satu penyebab. Selain itu, kondisi geografis juga membuat sebagian anak kesulitan menjangkau sekolah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen berencana memperkuat pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pemerintah juga akan meningkatkan penyelenggaraan berbagai program kursus serta memperkuat peran PKBM sebagai penyedia layanan pendidikan bagi masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.

Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu jalur alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Melalui program ini, peserta didik tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai jenjang yang dibutuhkan.

RUU Sisdiknas Ditargetkan Rampung Akhir September, Komisi X Terima Masukan Publik

Di samping memperluas akses pendidikan, Mu’ti menegaskan perlunya pembenahan tata kelola PKBM. Menurutnya, pengawasan harus diperkuat karena lembaga tersebut menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Pendataan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga perlu memastikan proses pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara tertib berdasarkan jenjang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

VIDEO

Video Pengunduran Diri Gibran Tembus 156,2 Juta Views, Potensi Dapat Rp2,9 Miliar

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.26 WIB

BANDA ACEH - Hampir sepekan berlangsung, video pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI masih menjadi topik hangat di media sosial.

Video pengunduran diri Gibran di instagram Selasa (17/11/2026) tembus 73,5 juta views.

Dalam video tersebut Gibran memohon maaf atas pengunduran dirinya.

Gibran terlihat memakai dasi merah dan setelan jas berwarna hitam dalam video pengunduran dirinya.

Selain video pengunduran diri, ada 27 video yang diunggah Gibran secara bersamaan sebelum mengumumkan mundur dari pemerintahan.

Puluhan video yang diunggah serempak sehari sebelum pengunduran diri itu juga mendulang views cukup tinggi.

Maka apabila ditotal 28 video tersebut mendulang views hingga 156,2 juta views.

Apabila monetisasi dibuka, maka Gibran bisa mendapatkan potensi Reels Play Bonus senilai Rp1,9 miliar hingga Rp2,9 miliar.

Namun biasanya akun pejabat negara monetisasinya tidak dibuka sehingga Gibran kemungkinan tidak mendapatkan adsanse dari video pengunduran dirinya.

Seperti diketahui dalam video tersebut Gibran Rakabuming Raka mengakui keputusannya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 sempat mengecewakan partai Politik yang selama ini membimbing dan membesarkannya.

Keputusan Gibran saat itu membuat dirinya berada di posisi berseberangan dengan partai yang memiliki peran dalam perjalanan politiknya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.36 WIB



BANDA ACEH -Verifikasi ijazah sepatutnya tidak hanya diberlakukan terhadap satu pejabat negara, tetapi juga dilakukan terhadap anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, menteri, hingga pejabat publik lainnya.

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik, Sugiyanto menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkembang menjadi persoalan nasional.

Menurut Sugiyanto, polemik tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperluas pembahasan mengenai transparansi riwayat pendidikan para pejabat publik di Indonesia.

Belakangan, muncul desakan agar ijazah anggota DPR, mulai dari pendidikan SLTA atau sederajat, termasuk Paket C, hingga jenjang S1, S2, dan pendidikan lainnya, diverifikasi serta dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Namun, menurut Sugiyanto, tuntutan transparansi tersebut tidak seharusnya hanya ditujukan kepada anggota DPR.

“Kebijakan yang sama perlu diberlakukan terhadap seluruh anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, perlu diperluas kepada para menteri dan seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Sugiyanto, dikutip Rabu 18 November 2026.

Sugiyanto menilai, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan harus menjadi landasan dalam menyikapi persoalan keabsahan ijazah pejabat negara.

Ketika persoalan ijazah seorang pejabat tinggi negara dapat memicu polemik besar hingga berkembang menjadi persoalan ketatanegaraan, kata dia, riwayat pendidikan pejabat publik lainnya juga patut mendapatkan perhatian yang sama.

Meski demikian, Sugiyanto memahami bahwa melakukan audit ijazah seluruh pejabat publik secara serentak berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Karena itu, ia mengusulkan pendekatan yang lebih proporsional, yakni verifikasi atau audit terhadap pejabat tertentu yang ijazahnya memiliki persoalan, diduga tidak sesuai, atau mendapat permintaan pemeriksaan dari masyarakat dengan disertai alasan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Audit tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadi alat untuk menyerang atau menjatuhkan seseorang karena kepentingan Politik. Pemeriksaan harus berdasarkan prosedur yang jelas, objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sugiyanto.

Sugiyanto mengakui bahwa dalam setiap tahapan pencalonan dan pengangkatan pejabat publik sebenarnya telah tersedia prosedur administrasi untuk memeriksa persyaratan pendidikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, memiliki kewenangan melakukan verifikasi persyaratan calon dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, keabsahan dokumen pendidikan dapat dikonfirmasi melalui lembaga pendidikan, perguruan tinggi, maupun instansi pemerintah yang berwenang.

“Keadilan bukan berarti semua orang harus diaudit tanpa alasan, tetapi setiap orang yang memiliki persoalan dan dasar pemeriksaan yang jelas harus mendapatkan perlakuan yang sama,” …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pigai Klaim Kementerian-nya Nomor 1 di Dunia: Tak Ada yang Boleh Kritik

Oleh Redaksi · 18 Nov, 14.11 WIB



BANDA ACEH - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan pernyataan mencolok saat memaparkan capaian kementeriannya di hadapan anggota DPR. Ia mengklaim Kementerian HAM telah menjadi nomor satu di dunia dalam bidang pendidikan dan pelatihan HAM. Pigai menyampaikan klaim tersebut dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

"Guinness World Records kategori largest human rights lesson di Indonesia, kita sudah pecahkan," ungkap Pigai.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan HAM merupakan salah satu tugas pokok kementeriannya sebagaimana diatur dalam Perpres 156 Tahun 2024.

"Pendidikan dan pelatihan yang dikasih oleh Presiden melalui Perpres 156 Tahun 2024, yaitu Kementerian HAM melaksanakan tugas pokok, salah satu tugas pokok adalah melaksanakan pendidikan pelatihan, kami pecahkan rekor dunia dan sekarang di seluruh dunia kami nomor satu," katanya.

Pigai pun mengaitkan capaian tersebut dengan ruang kritik terhadap Kementerian HAM. Menurutnya, publik tidak seharusnya mengkritik kementeriannya dalam urusan pendidikan dan pelatihan HAM karena telah meraih pengakuan melalui rekor dunia.

Meski begitu, ia mengakui bahwa penanganan kasus HAM tetap menjadi bidang yang terbuka terhadap kritik. Pigai menyadari kementeriannya belum tentu menjadi yang terbaik di dunia dalam aspek tersebut.

"Jadi tidak ada orang yang bisa kritik, karena dunia ini kami sudah nomor 1 dalam pendidikan pelatihan. Kalau penanganan kasus boleh kritik, kita harus tahu diri, karena di dunia belum tentu kami nomor satu," ucap Pigai.

"Pendidikan pelatihan pemasyarakatan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia Kementerian HAM nomor 1, sehingga tidak boleh ada yang kritik. Karena di dunia ini kami nomor 1 berdasarkan rekor dunia. Ya kalau yang bidang lain boleh kritik," tambah Pigai.

NASIONAL

Gerindra Minta Istana Steril dari Lingkaran ‘Orang Listyo’

Oleh Redaksi · 18 Nov, 16.10 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso meminta Istana Kepresidenan agar steril dari orang-orang dekat mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo."Memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!" ujar Sugiat saat rapat kerja dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro di ruang rapat Komisi XIII DPR, Rabu (18/11/2026).

Dirinya menilai, Presiden RI Prabowo Subianto sudah menjadi target penyadapan oleh Jenderal Listyo, sehingga sudah waktunya Istana melakukan bersih-bersih dari lingkaran mantan Kapolri tersebut.

"Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi," katanya.

Juru Bicara Partai Gerindra itu berharap jajaran Kementerian Sekretariat Negara tak memberikan peluang sekecil apapun kepada pengkhianat di lingkaran inti Presiden RI. Bukan hanya Paspampres, namun juga di lingkungan Sekretariat Negara.

"Sekali lagi tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus," tandasnya.

ACEH

Kasdam IM Pimpin Upacara Sertijab dan Tradisi Satuan Pejabat Kodam Iskandar Muda

Oleh Redaksi · 17 Nov, 16.24 WIB

BANDA ACEH – Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM) Brigjen TNI Ali Imran mewakili Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Satuan Pejabat Kodam Iskandar Muda yang berlangsung di Gedung Malahayati, Makodam Iskandar Muda, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI AD sekaligus proses pembinaan personel guna menjaga kesinambungan kepemimpinan, mengembangkan kemampuan prajurit, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kodam Iskandar Muda.

Dalam sambutan Pangdam IM yang dibacakan Kasdam IM, Pangdam menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada Kolonel Inf Adi Aradi, S.Pd., M.Pd., yang dipercaya menjabat sebagai Pamen Ahli Bidang Jemen Sishanneg Sahli Pangdam IM, serta Letkol Arm Nurul Arizain, S.E., M.Tr.Mil., sebagai Danyonarmed 17/RC Kodam IM.

Pangdam berharap, pengalaman, kemampuan, dan dedikasi yang dimiliki para pejabat baru dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi serta mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam Iskandar Muda.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam IM juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Letkol Arm Denapoleon Jayakarta, S.Sos., M.H.I., atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjabat sebagai Danyonarmed 17/RC. Selanjutnya, Pangdam mengucapkan selamat atas amanah baru yang dipercayakan kepadanya sebagai Dandim 0108/Aceh Tenggara Korem 011/Lilawangsa.

Pangdam menegaskan bahwa setiap pergantian jabatan merupakan momentum untuk menghadirkan semangat, pengalaman, dan gagasan baru bagi organisasi. Oleh karena itu, pejabat yang baru diharapkan segera beradaptasi, memahami karakteristik satuan, mengenali tugas dan tanggung jawab, serta membangun komunikasi dan kerja sama yang solid.

Selain itu, para pejabat baru diharapkan dapat melanjutkan berbagai program positif yang telah dirintis pejabat sebelumnya sekaligus melakukan penyempurnaan secara terukur guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme satuan.

Khusus kepada pejabat yang mendapat penugasan di wilayah teritorial, Pangdam juga menekankan pentingnya membina satuan, menjaga kondusivitas wilayah, serta …

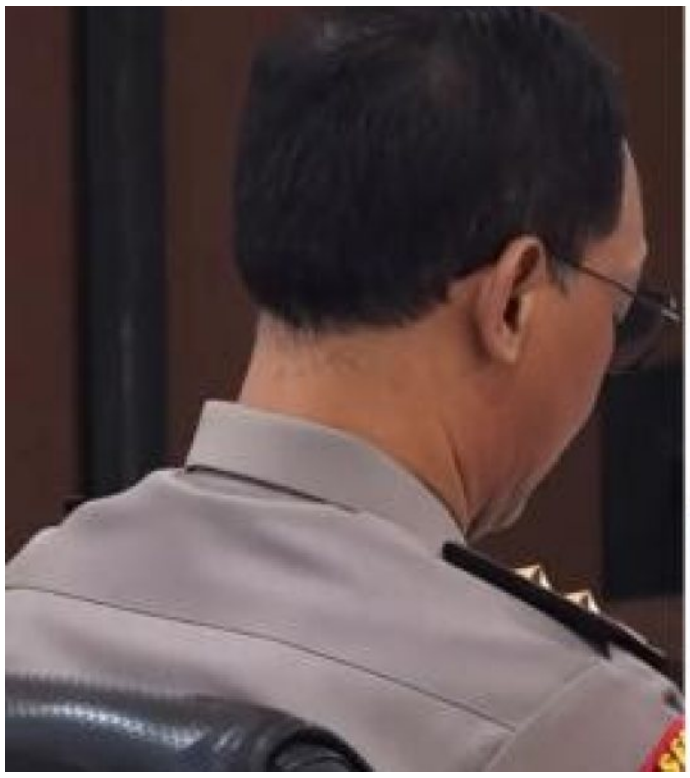
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

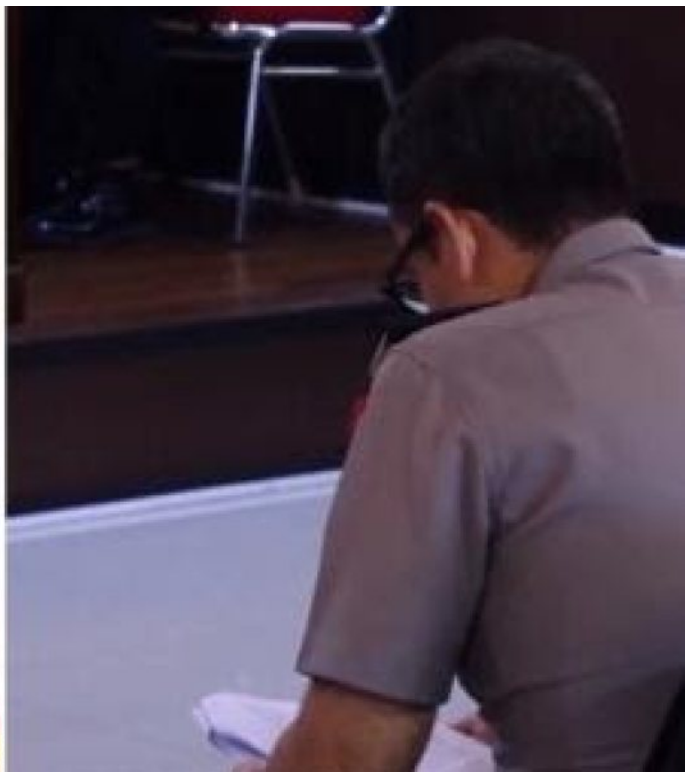
Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

2 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Ajukan Banding usai Dipecat

Oleh Redaksi · 18 Nov, 10.19 WIB





BANDA ACEH - Polri segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Polri memastikan permohonan banding kedua jenderal yang dipecat tersebut akan diproses sesuai mekanisme.

"Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (18/11/2026).

Dia mengatakan, hasil putusan komisi banding nantinya akan disampaikan kepada publik. Namun, Polri belum mengungkapkan kapan proses pemeriksaan banding tersebut akan selesai.

"Nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut," katanya.

Sebelumnya, Mabes Polri menjatuhkan sanksi terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Keputusan serupa kemudian dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

Kedua jenderal tersebut mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut. Melalui mekanisme banding KKEP, putusan etik yang dijatuhkan terhadap keduanya akan diperiksa kembali.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh Politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Keempat tersangka disebut dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun

NASIONAL

Prabowo Diminta Waspadai Geng Solo, Eks BIN: Masih 70% Kekuatan, Apa Pun Bisa Dilakukan

Oleh Redaksi · 18 Nov, 14.07 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto diminta tidak lengah menghadapi kekuatan kelompok yang disebut sebagai Geng Solo. Mantan Anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra, memperkirakan jaringan tersebut masih memiliki pengaruh besar di lingkungan pemerintahan.Menurut Radjasa, sejumlah perubahan Politik dan pergantian pejabat belum cukup untuk menghilangkan pengaruh kelompok yang dalam pernyataannya dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ia bahkan memperkirakan kekuatan jaringan yang disebutnya sebagai geng tersebut baru berkurang sekitar 30 persen. Artinya, menurut penilaiannya, masih ada sekitar 70 persen kekuatan yang tersisa.

"Nah, kalau melihat seperti ini, kekuatan mereka atau tentakel geng tersebut yang berada di pemerintahan ini mungkin baru 30 persen, belum sepenuhnya. Bahkan baru 30 persen yang terhapus," kata Radjasa dikutip Rabu (18/11/2026).

Radjasa mengingatkan presiden agar tidak meremehkan kemampuan jaringan yang dimaksudnya. Menurutnya, Geng Solo masih bisa melakukan apapun terhadap pemerintahan dari Prabowo.

"Masih 70 persen. Tapi jangan salah, Bang, kekuatan logistik dia full power. Apa pun bisa dilakukan, termasuk membuat situasi chaos," ujarnya.

Radjasa menilai perubahan di sejumlah posisi penting pemerintahan belum berarti jaringan yang ia sebut telah kehilangan seluruh pengaruhnya.

Ia menyinggung beberapa perkembangan, termasuk mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Namun, menurutnya, perubahan figur di jabatan tertentu tidak otomatis memutus jaringan yang sudah terbentuk.

Dalam pandangannya, kekuatan kelompok tidak hanya ditentukan oleh siapa yang sedang menduduki jabatan publik. Ada pula jaringan, pengaruh, dan dukungan logistik yang menurutnya masih perlu diwaspadai.

Diketahui, Geng Solo sendiri merupakan sebutan yang sering digunakan publik untuk menggambarkan kelompok atau jaringan yang berkaitan dengan Jokowi. Meski demikian, belum ada keterangan resmi terkait dengan hal tersebut.

NASIONAL

Polri Siapkan Majelis Sidang Etik Usai Ahrie Sonta dan Eko Hadi Ajukan Banding

Oleh Redaksi · 18 Nov, 10.22 WIB



BANDA ACEH -Mabes Polri akan segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk menggelar sidang banding bagi perwira tinggi Polri yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini diambil setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso resmi mengajukan banding atas putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu 18 November 2026.

Permohonan banding dari Ahrie dan Eko dipastikan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil putusan komisi banding tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada publik.

"Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut," jelas Trunoyudo

NASIONAL

Kedekatan Prabowo-Megawati Buka Peluang PDIP Isi Kursi Wapres

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.52 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto perlu memperhitungkan konfigurasi koalisi pemerintahan apabila mempertimbangkan kader PDI Perjuangan (PDIP) sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden (Wapres).

"PDI Perjuangan juga memiliki kesempatan sebagai pengganti Gibran. Kedekatan personal Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri membuka ruang bagi kemungkinan tersebut," ujar Pengamat Politik Nurul Fatta kepada RMOL, Rabu, 18 November 2026.

Namun, menurutnya, persoalan tidak sebatas hubungan personal kedua tokoh, melainkan juga menyangkut dinamika Politik di internal koalisi pemerintahan.

Pasalnya, PDIP sejak awal berada di luar koalisi partai politik pengusung Prabowo-Gibran.

"Masuknya kader PDIP sebagai Wakil Presiden berpotensi menimbulkan resistensi dari partai-partai yang sejak awal berinvestasi dalam kemenangan Prabowo," tegasnya.

Karena itu, pertimbangan politik dan keseimbangan kekuatan di dalam koalisi menjadi faktor penting dalam menentukan sosok pengganti Gibran

EKONOMI

Dibalik Efisiensi Uang Negara Malah Lari ke Proyek Influencer Rp14,7 Miliar

Oleh Redaksi · 17 Nov, 13.20 WIB

BANDA ACEH - - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni,Raffi Ahmad, akhirnya angkat bicara terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian yang dikaitkan dengan perusahaannya, PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi mengaku telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2024 mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima endorsement dan kerja sama profesional meski telah menjabat sebagai pejabat publik.

Ia juga menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh lembaga pengawas maupun auditor negara terkait kerja sama perusahaan tersebut dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Selasa (17/11/2026).

Menurut Raffi, hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima kerja sama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," katanya.

Meski demikian, Raffi mengakui bahwa jabatan kenegaraan yang diembannya melekat dengan aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang harus menjadi pertimbangan dalam …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Saatnya Uji Forensik Ijazah Anggota DPR hingga Komisaris BUMN

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.26 WIB



BANDA ACEH -Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak dilakukannya verifikasi menyeluruh dan uji forensik terhadap keabsahan ijazah anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan integritas, kredibilitas, serta akuntabilitas setiap individu yang menduduki jabatan strategis dan mengemban amanah publik.

Desakan tersebut menguat seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi riwayat pendidikan pejabat negara.

Berdasarkan pemberitaan Selasa 17 November 2026, petisi bertajuk Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR Tanpa Kecuali yang diinisiasi Farida Octavia telah memperoleh lebih dari 22 ribu tanda tangan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons desakan tersebut dengan menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR tersedia melalui KPU dan dapat ditelusuri masyarakat.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyebut verifikasi persyaratan pencalonan merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme perundang-undangan.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski menegaskan bahwa persoalan keabsahan ijazah tidak boleh dipandang sebagai polemik Politik sesaat. Menurutnya, transparansi dokumen pendidikan harus menjadi bagian dari standar integritas seluruh pejabat publik tanpa pengecualian.

"Jangan ada pengecualian dalam persoalan integritas. Anggota DPR, DPRD, direksi maupun komisaris BUMN harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas atas dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan," kata Joko, dikutip Rabu 18 November 2026.

"Jika seluruh dokumen pendidikan diperoleh secara sah, buktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, independen, dan profesional. Jangan alergi terhadap transparansi. Jabatan publik bukan hak istimewa untuk menghindari pertanggungjawaban," sambungnya.

KAMAKSI menilai, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan administrasi. Verifikasi perlu mencakup konfirmasi kepada institusi pendidikan penerbit ijazah, pencocokan data akademik, serta pemeriksaan forensik oleh laboratorium berwenang apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan pemalsuan dokumen.

KAMAKSI juga meminta KPU RI memastikan transparansi dan akuntabilitas verifikasi dokumen pencalonan anggota legislatif. Sementara Danantara dan pemegang saham BUMN didorong memperkuat pemeriksaan persyaratan pendidikan serta rekam jejak calon direksi dan komisaris melalui mekanisme seleksi yang berlaku.

Joko menegaskan bahwa pemeriksaan harus berlaku adil dan tidak boleh tebang pilih berdasarkan afiliasi politik, kedekatan kekuasaan, maupun jabatan seseorang.

"Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi konsumsi politik dan berhenti pada perdebatan di ruang publik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kata PSI: Jokowi dan Keluarganya Gak Berambisi dalam Urusan Politik

Oleh Redaksi · 18 Nov, 14.22 WIB



BANDA ACEH - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka melontarkan sindiran kepada pihak-pihak yang selama ini menuding keluarga Jokowi ambisius dalam urusan Politik. Ia justru menilai sejumlah peristiwa belakangan menjadi bukti bahwa tudingan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.Melalui akun X pribadinya, Dedy menyinggung keputusan Gibran Rakabuming Raka yang memilih mundur ketimbang sibuk mempertahankan posisi sebagai wakil presiden.

Sementara itu, ia menggambarkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tengah menikmati waktu di Solo, tetapi masih banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah.

"Ada satu bukti sederhana mengapa Jokowi dan keluarganya sebenarnya ngga terlihat berambisi dalam urusan politik," tulisnya di akun X, dikutip Rabu (18/11/2026).

"@gibran_tweet yang menang bersama Prabowo Subianto akhirnya memilih mundur dari pada sibuk bermanuver mempertahankan kursi nomor 2. @jokowi yang duduk santai di rumahnya di Solo malah terus mendapatkan kunjungan dari rakyat Indonesia," ujarnya.

Dalam unggahannya, Dedy juga menyindir Sadewa sebagai salah satu sosok yang selama ini vokal mengkritik Jokowi dan Gibran.

"Sementara @Sadewa_ dkk masih pusing mencari alasan kalau keluarga politik yang mereka cap dengan "geng Solo" sangat ambisius dalam politik," ungkap Dedy.

Dedy menilai berbagai tudingan terhadap keluarga Jokowi pada akhirnya akan gugur dengan sendirinya. Olehnya itu, ia menegaskan akan tetap memberikan dukungan kepada keluarga Jokowi karena menganggap mereka memiliki rekam jejak kerja yang nyata.

"Semua tuduhan mereka itu runtuh dengan sendirinya. Jadi, rakyat seperti saya dan masih banyak lagi rakyat lainnya masih akan terus mendukung keluarga politik Solo ini karena memang mereka punya jejak kerja yang nyata, bukan omon-omon tapi kosong," pungkasnya.

NASIONAL

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.30 WIB



BANDA ACEH -Irjen Eko Hadi Santoso disebut menyesal dan meminta maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Gedung Propam, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 November 2026.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan Eko Hadi menyatakan banding terhadap putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Anam dalam konferensi pers.

Sementara Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dalam sidang tersebut Eko Hadi juga mengajukan saksi meringankan.

"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama saudari DR," kata Trunoyudo.

Namun Trunoyudo tidak merinci sosok saksi yang dimaksud dalam sidang etik tersebut.

Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Mabes Polri secara resmi menjatuhkan hukuman atau sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso.

Adapun sanksi berat diberikan karena tindakan Eko Hadi yang masuk dalam kategori pelanggaran berat.

NASIONAL

Kapolri Suyudi Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan? Cek Penjelasan Polri

Oleh Redaksi · 18 Nov, 10.27 WIB

BANDA ACEH - Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pekan depan.

Kini Mabes Polri tengah menyiapkan susunan majelis etik tersebut. Berdasar aturan, sidang itu bisa dipimpin oleh jenderal bintang dua, jenderal bintang tiga, atau jenderal bintang empat, dalam hal ini Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP sudah mengatur mekanisme persidangan.

"Tepatnya di Pasal 42, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan," kata Trunoyudo dikutip pada Rabu (18/11).

Dilihat dari dokumen perpol yang dimaksud oleh Trunoyudo, Pasal 42 ayat (3) menjelaskan bahwa keanggotaan KKEP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal yang sama bisa berpangkat setingkat lebih tinggi dari terduga pelanggar, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.

Merujuk penjelasan pasal tersebut, maka perwira tinggi (pati) Polri yang dapat memimpin sidang etik Jenderal Sigit minimal berpangkat irjen (bintang dua). Bisa juga berpangkat komjen (bintang tiga).

Atau jika ingin setara, sidang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai satu-satunya jenderal bintang empat di tubuh Polri.

"Nanti akan kami sampaikan (susunan majelisnya) sesuai dengan mekanisme perpol yang kami sampaikan tadi," ucap Trunoyudo.

Dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri sudah melaksanakan sidang etik terhadap dua orang tersangka.

Masing-masing adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Keduanya sama-sama dipecat dan mengajukan banding.

Sehingga tinggal dua tersangka yang belum disidangkan, yakni Jenderal Sigit dan Irjen Slamet Uliandi.

Khusus nama kedua, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sudah menjelaskan bahwa yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit sehingga belum bisa disidangkan.

"Salah satu terduga pelanggar, SU (Slamet Uliandi), memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan. Jadi, belum bisa kemudian kami paksakan (sidang), nggak bisa," ucap Isir.

Meski Kapolri sudah menegaskan tidak pandang bulu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri aktif, Mabes Polri tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang juga …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Terungkap! 191 Anggota DPR Ternyata Lulusan SMA

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.57 WIB



BANDA ACEH - Sebanyak 191 dari 580 anggota DPR RI tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini muncul di tengah desakan publik agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka dan diverifikasi.

Berdasarkan data KPU per Desember 2025, lulusan SMA menjadi kelompok terbesar di antara anggota DPR. Sementara itu, 168 anggota tercatat berpendidikan S2, 146 orang lulusan S1, 74 orang lulusan S3, dan satu orang berpendidikan D3.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan data tersebut berasal dari pemeriksaan dokumen ijazah yang diserahkan para calon anggota legislatif saat proses pencalonan.

"Semua caleg yang didaftarkan oleh partai Politik dan ditetapkan dalam (daftar calon tetap) DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan," ujar Idham saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).

KPU menegaskan, lulusan SMA tetap memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aturan tersebut mensyaratkan calon anggota DPR minimal berpendidikan tamat SMA, madrasah aliah, SMK, madrasah aliah kejuruan, atau sederajat.

Sebelumnya, muncul petisi di laman Change.org yang mendesak agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka kepada publik dan diverifikasi.

Petisi itu dibuat oleh Farida Octavia pada Kamis (12/11/2026) dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI, KPU RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam petisinya, Farida menilai latar belakang pendidikan anggota DPR perlu diketahui masyarakat karena mereka memegang mandat rakyat dan terlibat dalam pengelolaan anggaran negara serta pembentukan undang-undang.

"Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis (ijazah) para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik," demikian bunyi petisi tersebut.

Farida juga menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tengah berada pada titik krusial. Karena itu, ia mendorong keterbukaan dokumen pendidikan agar masyarakat dapat memastikan keabsahan ijazah para wakil rakyat.

"Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka," tulisnya

NASIONAL

Kepala Bakom Beri Isyarat Pengganti Gibran: Berdoa Saja, Wapres yang Suka Pempek

Oleh Redaksi · 18 Nov, 18.45 WIB



BANDA ACEH - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan merespons munculnya tiga nama politisi yang diisukan menjadi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketiganya yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Syahganda menilai ketiga sosok tersebut memiliki pemahaman terhadap ideologi Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengaku belum mengetahui siapa yang nantinya dipilih untuk menggantikan Gibran.

"Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden ya," ujar Syahganda, Rabu (18/11/2026).

Dia meminta masyarakat menunggu keputusan Prabowo terkait sosok yang akan dipilih sebagai cawapres pengganti Gibran. Terlebih, partai-partai dalam koalisi disebut telah menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo dan Partai Gerindra.

"Kan sudah diumumkan ya oleh teman-teman koalisi partai bahwa mereka menyerahkan semuanya ke Pak Prabowo, ke Partai Gerindra," tutur dia.

Di sisi lain, Syahganda sempat melontarkan kelakar saat menanggapi isu bursa calon wakil presiden tersebut. Dia menyebut masyarakat cukup mendoakan sosok yang nantinya dipilih, sembari melontarkan petunjuk soal pempek.

"Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek," ujar Syahganda

NASIONAL

Beathor Suryadi: Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.39 WIB



BANDA ACEH -Dokumen ijazah milik mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut telah dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perlu diperiksa melalui laboratorium forensik.

Demikian disampaikan politisi PDIP Beathor Suryadi, dikutip Rabu 18 November 2026.

Menurut Beathor, pemeriksaan forensik diperlukan agar tidak ada keraguan mengenai autentisitas dokumen pendidikan Gibran.

“Bila benar Gibran telah memasukkan dokumen ijazahnya ke PTUN, kita sangat yakin bahwa Gibran tidak punya ijazah. Maka dokumen yang ada di PTUN itu harus diuji di laboratorium forensik dan tentu hasilnya palsu,” kata Beathor.

Menurut Beathor, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada keberadaan dokumen secara administratif. Keaslian dokumen, proses penerbitan, serta kesesuaiannya dengan arsip lembaga pendidikan yang bersangkutan juga perlu ditelusuri.

Ia berpandangan, laboratorium forensik harus dilibatkan untuk menguji berbagai aspek dokumen, termasuk karakteristik fisik, tanda tangan, cap, material, serta kemungkinan perubahan atau manipulasi dokumen.

Beathor juga mengaitkan polemik tersebut dengan persoalan hukum. Apabila dalam pemeriksaan terbukti terdapat pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu, menurutnya, persoalan itu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Dengan demikian semakin yakin Gibran terkena pasal pemalsuan dokumen,” pungkas Beathor.

NASIONAL

Dipecat dari Polri Buntut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Minta Maaf

Oleh Redaksi · 18 Nov, 09.06 WIB



BANDA ACEH - Polri resmi memecat Irjen Pol Eko Hadi Santoso melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa malam (17/11).

Dia dinyatakan terbukti melanggar aturan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan majelis etik, Eko menyampaikan permohonan maaf.

Usai persidangan, Eko tampak digiring masuk ke dalam kendaraan taktis (rantis) Brimob dengan pengawalan ketat.

Tidak hanya itu, Eko sudah mengenakan pakaian tahanan berwarna biru. Tangannya juga terborgol. Dia berjalan cepat tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media.

”Walaupun (Eko mengajukan) banding, tadi juga ada ucapan dari terduga (pelanggar) itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang turut menyaksikan jalannya sidang etik.

Namun demikian, permintaan maaf tersebut tidak lantas berpengaruh terhadap putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang sudah dijatuhkan.

Putusan itu akan diuji kembali dalam sidang komisi banding. Sementara, Eko juga masih berstatus tersangka kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses.

Dalam persidangan tersebut, Eko disangkakan telah menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, dan terlibat permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Sangkaan itu dinyatakan terbukti sehingga salah satu putusannya adalah sanksi etik yang berbunyi Eko melakukan tindakan tercela.

”Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo kepada awak media di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.

Eko menjadi jenderal bintang dua Polri kedua yang dipecat oleh Polri dalam rangkaian kasus dugaan penyadapan tersebut.

Pekan lalu, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sudah lebih dulu menjalani sidang etik dan dijatuhi hukuman PTDH. Keduanya sama-sama mengajukan banding.

”Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut. Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya (Ahrie dan Eko) tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding. Bagaimana mekanismenya tadi aturannya, tetapi ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” ucap Trunoyudo

NASIONAL

Ahmad Khozinudin: Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.42 WIB



BANDA ACEH -Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tidak otomatis menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri.

Hal itu disampaikan Advokat Ahmad Khozinudin, dalam podcast Madilog yang tayang Selasa, 17 November 2026.

Menurutnya, pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan berbeda dengan pertanggungjawaban jabatan. Karena itu, proses hukum terkait dugaan penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran harus tetap berjalan.

"Yang pertama mundurnya Gibran itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Pidana jalan terus," kata Khozinudin.

Ia menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dinilai bermasalah.

Khozinudin mempersoalkan dasar penerbitan surat keterangan tersebut. Menurutnya, dokumen pendidikan yang ditemukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menunjukkan adanya ijazah, sertifikat kelulusan, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA.

Ia merujuk pada keberadaan certificate of attendance yang menurutnya bukan bukti kelulusan, melainkan hanya menunjukkan seseorang pernah mengikuti pendidikan.

"Yang ditemukan hanya certificate of attendance. Dan itu juga sudah dipertimbangkan MK. Itu bukan bukti kelulusan," kata Khozinudin.

Khozinudin mengatakan, pihaknya telah meminta Bareskrim melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk memperjelas perkara tersebut.

Bahkan, ia mendorong agar proses hukum ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan apabila bukti dan unsur pidana telah terpenuhi.

"Pembatalan surat keterangan secara administratif tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menerbitkan maupun menggunakan dokumen tersebut," kata Khozinudin.

"Jauh sebelum DPR melakukan proses pemakzulan, jauh sebelum Gibran mundur. Bahkan proses ini tidak ada kaitannya dengan Gibran mundur. Mundur atau dimakzulkan, proses pidana ini jalan terus," sambungnya.

NASIONAL

Selamat Ginting: 6 Pati Polri Berpeluang Jadi Tersangka Baru Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.49 WIB



BANDA ACEH -Selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, diperkirakan masih ada sejumlah perwira tinggi (Pati) lain yang terlibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Pengamat Politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam podcast Madilog dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu 18 November 2026.

"Patut diduga akan ada perwira tinggi lain yang akan jadi tersangka. Informasi terbaru ada enam lagi yang ditahan," kata Ginting.

Sehingga total ada 10 Pati Polri yang sudah dijebloskan ke dalam jeruji besi.

"Tentu ini harus diverifikasi lebih lanjut," kata Ginting.

Untuk itu, Ginting mendorong Polri buka-bukaan atas hasil pengungkapan kasus penyadapan tersebut.

"Sehingga ini secara independen bisa mengonfirmasi apakah ada jenderal aktif lain yang menjadi tersangka," kata Ginting.

Di sisi lain, Ginting menyoroti delapan saksi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Keamanan mereka harus dilindungi," pungkas Ginting.

NASIONAL

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.33 WIB



BANDA ACEH -Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengungkapkan adanya kemungkinan sejumlah jenderal polisi purnawirawan yang sebelumnya tidak berada dalam faksi Listyo Sigit Prabowo (LSP) menawarkan diri menjadi saksi yang dapat memberatkan mantan Kapolri tersebut.

Menurut Ginting, para purnawirawan itu bahkan memiliki senioritas lebih tinggi dibandingkan Listyo Sigit. Namun, mereka disebut membutuhkan perlindungan apabila memberikan keterangan dalam perkara tersebut.

"Mereka justru lebih senior daripada Jenderal Listyo Sigit Prabowo," kata Ginting dalam podcast Madilog dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu 18 November 2026.

Ginting menilai, apabila dugaan makar benar-benar menjadi bagian dari penyelidikan, perkara tersebut tidak mungkin hanya melibatkan empat atau sepuluh orang. Menurut dia, operasi sebesar itu membutuhkan jaringan dan kekuatan yang lebih luas.

"Bicara makar, tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh empat atau sepuluh orang. Pasti ada tim yang sangat kuat. Banyak mantan Kapolda itu terlibat dalam jaringan ini. Siap-siap saja mereka juga akan menjadi tersangka," kata Ginting.

Ia juga menyoroti aksi apel dengan membawa obor dan mengenakan ikat kepala merah putih. Ginting menilai simbol dan pernyataan dalam aksi tersebut perlu dicermati secara serius karena mengandung pesan perlawanan.

Bahkan, ia menafsirkan seruan melawan sampai titik darah penghabisan sebagai deklarasi kudeta. Meski demikian, penilaian tersebut merupakan interpretasi Selamat yang masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

"Itu kan deklarasi itu sebenarnya deklarasi kudeta. Apel dengan obor, memakai ikat kepala merah putih, dan menyatakan akan melawan sampai titik darah penghabisan," kata Ginting

ACEH

5 BERITA

ACEH

Pj Sekda Aceh Hadiri Pelantikan Pengurus ICMI Orwil Aceh Periode 2026–2031

Oleh Redaksi · 18 Nov, 14.53 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Aceh periode 2026–2031 yang dirangkai dengan seminar nasional di Hotel Muraya, Rabu (18/11/2026).

Taufik hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sekaligus membacakan sambutan gubernur pada kegiatan yang mengangkat tema "Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan dan Keberlanjutan Pembangunan" tersebut.

Dalam sambutan yang dibacakannya, Gubernur Aceh menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus ICMI Orwil Aceh yang baru dilantik. Ia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian.

Menurut gubernur, ICMI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya para cendekiawan Muslim dengan kapasitas keilmuan, integritas moral, serta kepedulian terhadap persoalan umat dan bangsa.

ICMI diharapkan tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan pemikiran, inovasi, dan rekomendasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga menilai tema seminar nasional tersebut sangat relevan dengan kondisi Aceh, terutama menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025 dan dampaknya masih menjadi tantangan dalam proses pemulihan.

Di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung, Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Penetapan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, serta mengambil langkah penanganan guna melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana.

Selain penanganan darurat, pemerintah juga terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat dapat berjalan semakin baik.

Dalam sambutan itu, gubernur menekankan bahwa bencana harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pola pembangunan, memperkuat tata kelola lingkungan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko.

"Karena itu, pendekatan berbasis sains dan kajian akademis dinilai penting dalam menghasilkan riset, inovasi teknologi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat dan terukur," ujar Taufik membacakan sambutan gubernur.

Pemerintah Aceh juga berharap ICMI dapat mengambil peran lebih aktif sebagai mitra strategis pemerintah melalui sumbangan pemikiran konstruktif, kajian objektif, dan gagasan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Polres Aceh Barat Gandeng BUJP Buka Peluang Kerja Satpam

Oleh Biro Meulaboh · 18 Nov, 16.29 WIB



Momen penandatanganan kesepakatan antara pihak kepolisian dan instansi terkait untuk meningkatkan sinergi pelayanan.

MEULABOH – Polres Aceh Barat terus memperluas upaya membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan melalui Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Kali ini, Polres menggandeng Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Provinsi Aceh untuk membuka akses kerja bagi masyarakat, khususnya di bidang jasa pengamanan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Satya Haprabu Polres Aceh Barat, Rabu (18/11/2026).

Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., yang memimpin langsung kegiatan itu mengatakan, POLIRAN merupakan salah satu Program Prioritas Kapolri sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja.

Melalui program tersebut, Polri berupaya menjadi penghubung antara pencari kerja dengan perusahaan atau badan usaha yang membutuhkan tenaga kerja.

Kapolres menjelaskan, pelaksanaan POLIRAN dilakukan melalui empat langkah, yakni menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan hingga tingkat gampong melalui Bhabinkamtibmas, mendata masyarakat yang belum bekerja, memfasilitasi peningkatan keterampilan melalui pelatihan, serta menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Kerja sama dengan BUJP Provinsi Aceh menjadi langkah konkret untuk membuka peluang tersebut, terutama bagi masyarakat yang berminat berkarier sebagai anggota Satuan Pengamanan (Satpam).

Melalui kemitraan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lowongan kerja, persyaratan menjadi Satpam, tahapan seleksi hingga mekanisme penempatan tenaga kerja.

Kepala BUJP Provinsi Aceh Nasrul Azan turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo, S.H., M.H., pejabat utama Polres, para Kapolsek jajaran, personel kepolisian, anggota Satpam, serta masyarakat pencari kerja.

Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan pihak BUJP mengenai peluang kerja dan proses perekrutan tenaga pengamanan.

Melalui Program POLIRAN, Polres Aceh Barat berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap lapangan pekerjaan. Sinergi dengan BUJP dan berbagai pihak terkait juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.[]

Editorial: Biro Meulaboh.

ACEH

Pemerintah Aceh Dorong ICMI Perkuat Peran dalam Mitigasi Bencana dan Pembangunan

Oleh Redaksi · 18 Nov, 14.53 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mendorong Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Aceh untuk memperkuat kontribusi dalam mitigasi bencana, pemulihan pascabencana, dan pembangunan berkelanjutan melalui kajian ilmiah, inovasi, serta rekomendasi kebijakan.

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, pada pelantikan Pengurus ICMI Orwil Aceh periode 2026–2031 yang dirangkai dengan seminar nasional di Hotel Muraya, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan dan Keberlanjutan Pembangunan".

Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus ICMI Orwil Aceh yang baru dilantik. Ia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian.

Menurut gubernur, ICMI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya para cendekiawan Muslim yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan umat dan bangsa.

Karena itu, ICMI diharapkan tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan pemikiran, inovasi, dan rekomendasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur menilai tema seminar nasional tersebut relevan dengan kondisi Aceh, terutama setelah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025. Dampak bencana tersebut hingga kini masih menjadi tantangan dalam proses pemulihan.

Di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung, Pemerintah Aceh telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Penetapan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, serta mengambil langkah penanganan guna melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana.

Selain penanganan darurat, pemerintah juga terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Upaya tersebut dilakukan agar pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat dapat berjalan semakin baik.

Dalam sambutan itu, gubernur menekankan bahwa bencana harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pola pembangunan, memperkuat tata kelola lingkungan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko.

"Karena itu, pendekatan berbasis sains dan kajian akademis dinilai penting dalam menghasilkan riset, inovasi teknologi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat dan terukur," ujar Taufik membacakan sambutan gubernur.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kapolres Aceh Barat Apresiasi Personel Pengungkap BBM Subsidi dan Curanmor

Oleh Biro Meulaboh · 18 Nov, 16.03 WIB



Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyerahkan penghargaan kepada personel berprestasi,FOTO/ist

MEULABOH– Sejumlah personel Polres Aceh Barat menerima penghargaan dari Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., atas keberhasilan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara di halaman Mapolres Aceh Barat, Rabu (18/11/2026) pagi, yang dipimpin langsung oleh Kapolres selaku Inspektur Upacara. Kegiatan itu diikuti pejabat utama, perwira, serta personel Polres Aceh Barat dan Polsek jajaran.

Pemberian penghargaan tersebut berdasarkan Keputusan Kapolres Aceh Barat Nomor KEP/21/XI/2026 tanggal 17 November 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan prestasi anggota dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Adapun penerima penghargaan di antaranya AKP Deno Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Kasat Reskrim, dan IPDA Masykur, S.H., selaku Kaurbinopsnal Satreskrim, atas keberhasilan mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan curanmor.

Selanjutnya, IPDA Popo Prabowo, S.Sos., selaku Kanit 3 Satreskrim bersama lima personel lainnya mendapat penghargaan atas pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sementara IPDA Maryudi Bintoro, S.A.B., selaku Kanit 1 Satreskrim bersama 12 personel lainnya diapresiasi atas keberhasilan mengungkap kasus curanmor.

Kapolres Aceh Barat menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi terhadap personel yang telah menunjukkan kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Prestasi tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus merupakan hasil kerja sama dan soliditas tim, bukan semata-mata pencapaian individu.

Melalui pemberian penghargaan ini, Polres Aceh Barat berharap seluruh personel semakin termotivasi untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus meningkatkan upaya penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Aceh Barat.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Wagub Aceh Bersama Menko PMK Tinjau Penanganan Banjir di Subulussalam

Oleh Redaksi · 18 Nov, 11.38 WIB



SUBULUSSALAM – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, meninjau langsung kondisi banjir di Kota Subulussalam, Selasa (17/11/2026).

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Kristomei Sianturi, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat, Teuku Faisal Fathani.

Kedatangan Menko PMK bersama rombongan disambut Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, Wakil Wali Kota Subulussalam M. Nasir Kombih, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon, serta jajaran Forkopimda Kota Subulussalam dan Forkopimda Kabupaten Aceh Singkil.

Rombongan tiba di Subulussalam melalui pendaratan di Lapangan Bola Jambi. Selanjutnya, rombongan menuju Kampong Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, untuk mengikuti kegiatan penyerahan bantuan dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana banjir.

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak bencana serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir.

Usai penyerahan bantuan, Menko PMK bersama Wagub Aceh dan rombongan meninjau langsung lokasi banjir, termasuk kawasan aliran Sungai Lae Souraya yang meluap dan berdampak terhadap permukiman masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat Aceh yang sedang menghadapi bencana banjir.

Menurutnya, sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap melalui perhatian dan dukungan pemerintah pusat ini, penanganan banjir di Aceh, khususnya di Kota Subulussalam, dapat dipercepat. Yang paling penting adalah memastikan keselamatan masyarakat, memenuhi kebutuhan warga terdampak, serta mencari solusi jangka panjang agar persoalan banjir yang terus berulang dapat ditangani secara menyeluruh," ujar Fadhlullah.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat langkah penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan banjir serta memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat terdampak di Subulussalam.[]

HIBURAN

4 BERITA

HIBURAN

Ekosistem Hiburan Digital Indonesia yang Terus Berkembang

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.09 WIB



Gambar ini menampilkan berbagai elemen hiburan digital di Indonesia, termasuk streaming video, musik, dan esports dengan latar belakang ikonik Monas. Terlihat sekelompok anak muda dan keluarga yang aktif menggunakan perangkat digital serta ikon aplikasi populer seperti YouTube dan Netflix. Poster ini juga mengajak masyarakat untuk menikmati konten digital secara bijak demi

BANDA ACEH - Indonesia punya komunitas pengguna internet yang sangat aktif. Pelajari cara masyarakat menikmati konten dan platform hiburan online masa kini.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat pertumbuhan penggunaan internet yang sangat tinggi di Asia Tenggara, dan kebiasaan konsumsi hiburan digitalnya terus berubah. Mulai dari platform streaming video, aplikasi musik, hingga layanan interaktif yang diperuntukkan bagi pengguna dewasa, ragam pilihan hiburan online di Indonesia semakin luas. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penetrasi smartphone dan jaringan internet yang semakin terjangkau di berbagai pelosok wilayah.

Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga cara mereka mengisi waktu luang. Hiburan yang dulu terbatas pada televisi dan bioskop kini hadir dalam genggaman, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Pergeseran ini membentuk pola konsumsi baru yang menarik untuk dipahami lebih dalam.

Lanskap Hiburan Digital di Indonesia

Pasar hiburan digital Indonesia ditandai oleh keberagaman selera dan latar belakang pengguna. Wilayah yang sangat luas, dengan ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, menciptakan ekosistem konten yang kaya. Platform yang berhasil di Indonesia umumnya adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal, baik dari sisi bahasa, konten, maupun model harga.

Penetrasi mobile internet yang tinggi membuat sebagian besar konsumsi digital dilakukan lewat smartphone. Ini membentuk preferensi terhadap konten berformat pendek, antarmuka yang ringan, dan aplikasi yang tidak terlalu boros data. Di sisi lain, pengguna di kota-kota besar dengan akses internet cepat cenderung lebih terbuka terhadap platform berat seperti streaming video berkualitas tinggi atau game online dengan grafis detail.

Perbedaan demografis ini menciptakan segmentasi yang jelas dalam pasar hiburan digital:

• Pengguna muda perkotaan cenderung mengonsumsi konten esports, vlog, dan short-form video
• Pengguna dari kota menengah banyak menikmati sinetron streaming dan podcast berbahasa Indonesia
• Kelompok yang lebih dewasa lebih menyukai berita digital, konten religi, dan radio streaming

Streaming Video dan Kekuatan Konten Lokal

Platform streaming video telah mengubah cara masyarakat Indonesia menikmati film dan serial. Konten lokal memiliki daya tarik yang kuat — serial drama Indonesia, film horor, dan konten berbasis budaya pop lokal sering kali meraih angka penonton yang mengalahkan konten internasional di platform yang sama.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Raffi Ahmad Disentil Usai Donasikan Honor Rp15 M: Biar Terlihat Murah Hati

Oleh Redaksi · 18 Nov, 14.14 WIB



BANDA ACEH - Nama Raffi Ahmad terus menjadi bahan perbincangan setelah keputusannya bersama rekan-rekan The Dudas Minus One menyumbangkan honor kerja sama dengan pemerintah senilai Rp15 miliar untuk korban bencana. Namun, aksi donasi tersebut justru mendapat sindiran dari psikolog Lita Gading.Lita Gading melalui unggahan di akun Instagram @lita.gading mengajak publik mencermati gurita bisnis milik suami Nagita Slavina itu. Ia membuka komentarnya dengan menyinggung luasnya jaringan bisnis dan kekuasaan Raffi.

"Guys, dengarkan sampai habis, ini berita bagus kalau menurut saya. Simak baik-baik gurita kekuasaannya Raffi Ahmad, silahkan kalian simak ya," kata Lita Gading.

Lita kemudian menyinggung pernyataan orang-orang terdekat Raffi yang menyebut presenter tersebut sudah bergelimang harta sejak dahulu. Ia juga membagikan ulang sebuah video yang mengulas perjalanan salah satu unit bisnis Raffi, yakni RANS Entertainment.

"Dengerin, ini fakta real. Saya sudah cek," tambahnya.

Video tersebut berasal dari konten kreator Media Bang Nugho yang membahas kejanggalan terkait RANS Entertainment, termasuk ekspansi bisnis perusahaan yang disebut berlangsung secara besar-besaran dalam waktu relatif singkat.

Setelah menyoroti perjalanan bisnis Raffi, Lita pun menyindir keputusan sang presenter untuk menyumbangkan dana miliaran rupiah kepada korban bencana.

"Di balik layar Gurita Bisnis Raffi Ahmad? Rp14,5 miliar mah belum apa-apa makanya disumbangin," sindir Lita.

Ia kemudian melontarkan komentar lebih tajam dengan menyinggung kebiasaan memberikan donasi ketika seseorang tengah menghadapi masalah.

"Tetap ya kalau ada masalah ujung-ujungnya donasi bagi-bagi duit biar terlihat murah hati. Bassiiiii," tutup Lita.

HIBURAN

LINK Konten Berbayar Video Ce Crystine Bertarif Rp 181 Ribu Per Bulan, Apa Benefitnya?

Oleh Redaksi · 18 Nov, 15.15 WIB



BANDA ACEH - Nama kreator TikTok Ce Crystine tengah menjadi perhatian publik setelah terseret kasus dugaan penjualan konten bermuatan pornografi.Perempuan asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tersebut bersama suaminya diduga memperoleh pendapatan hingga Rp400 juta dari aktivitas bisnis digital yang telah berlangsung sejak Maret 2025.

Kasus ini terungkap setelah Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar Kota melakukan patroli siber dan menemukan materi yang diduga mengandung unsur pornografi di sebuah situs internet. Penyelidikan kemudian mengarah kepada K (38), yang dikenal dengan nama Ce Crystine, serta suaminya PEK (40).

Keduanya akhirnya ditangkap polisi di sebuah rumah kos di Denpasar, Bali, setelah diduga menjalankan aktivitas tersebut hingga November 2026.

Popularitas Ce Crystine di TikTok

Sebelum kasus ini mencuat, Ce Crystine dikenal sebagai kreator konten melalui akun TikTok @ce.crystine. Akun tersebut memiliki sekitar 178,3 ribu pengikut dengan sejumlah unggahan yang berhasil menjangkau jutaan penonton.

Konten yang dipublikasikannya banyak mengangkat humor bernuansa dewasa, rayuan, serta interaksi menggunakan istilah budhe dan berondong. Salah satu unggahannya bahkan dilaporkan memperoleh sekitar 1,2 juta tayangan.

Meski demikian, popularitas akun TikTok tersebut berbeda dengan perkara hukum yang kini sedang ditangani kepolisian.

Pembagian Tugas dalam Bisnis Konten Berbayar

Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan tersebut diduga memiliki peran masing-masing dalam menjalankan bisnis konten digital.

K disebut bertanggung jawab memproduksi foto dan video bermuatan pornografi dengan dirinya sebagai pemeran. Proses perekaman dilakukan menggunakan telepon seluler dan tripod.

Sementara itu, PEK diduga mengelola akun media sosial, situs berlangganan, serta proses pemasaran dan pengunggahan materi kepada pelanggan. Keduanya juga disebut memanfaatkan fitur siaran langsung untuk menarik calon konsumen.

Konten tersebut dipasarkan menggunakan sistem keanggotaan berbayar. Setiap pelanggan dikenakan tarif 10 dolar AS atau setara sekitar Rp181 ribu untuk akses selama satu bulan.

Materi baru dikabarkan diunggah secara rutin sedikitnya dua kali dalam sepekan. Dari kegiatan tersebut, pasangan ini diduga memperoleh pemasukan sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta setiap bulan.

Jika dihitung selama kurang lebih 20 bulan, akumulasi omzet bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp400 juta.

Persoalan Ekonomi Diduga Menjadi Latar Belakang

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengungkapkan bahwa persoalan ekonomi diduga menjadi salah satu alasan pasangan tersebut menjalankan aktivitas tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Ternyata KPK Sudah Ingatkan Raffi Ahmad soal Konflik Kepentingan

Oleh Redaksi · 18 Nov, 13.00 WIB

BANDA ACEH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa persoalan potensi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu hal yang menjadi materi konsultasi dan pendampingan pencegahan korupsi.

Hal itu disampaikan KPK merespons pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 terkait statusnya sebagai pejabat publik sekaligus pesohor atau influencer.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah terbuka kepada siapa saja yang ingin berkonsultasi maupun meminta pendampingan terkait upaya pencegahan korupsi.

"KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi, untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026.

Budi menjelaskan, melalui konsultasi dan pendampingan tersebut, KPK memberikan rekomendasi agar potensi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus dapat dicegah dan dimitigasi sejak awal.

"Karena memang pada ranah pencegahan itu kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi ya dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah, bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," jelas Budi.

Budi menambahkan, konsultasi dalam ranah pencegahan juga dapat mencakup persoalan dugaan atau potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa," pungkas Budi.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.

Temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

6 BERITA

INTERNASIONAL

LIFE for Relief: Ribuan Perempuan dan Anak di Gaza Kehilangan Akses Pangan dan Layanan Kesehatan

Oleh telridi@lifeusa.org · 18 Nov, 19.09 WIB



Seorang pria dengan rompi biru yang merupakan realawan Life memberikan dua kaleng susu formula kepada seorang wanita yang sedang menggendong balita. Latar belakang menunjukkan lingkungan kamp pengungsian dengan tenda-tenda kain dan bangunan yang rusak di bawah sinar matahari yang terik. FOTO/Dok. Lifeusa.

Ribuan Janda, Perempuan, dan Anak Perempuan Menghadapi Kelaparan, Pengungsian, dan Hilangnya Akses terhadap Layanan Kesehatan

GAZA - Penderitaan perempuan di Jalur Gaza tidak lagi terbatas pada dampak perang dan menjadi janda di usia muda. Krisis kemanusiaan telah berkembang menjadi situasi yang semakin berat, memaksa ratusan ribu perempuan untuk menanggung sendiri tanggung jawab menghidupi keluarga dan merawat anak-anak mereka, di tengah pengungsian berulang, ketiadaan tempat tinggal yang layak, kekurangan pangan dan air bersih, serta memburuknya layanan kesehatan.

Laporan yang diterbitkan oleh UN Women mengungkapkan bahwa lebih dari 38.000 perempuan dan anak perempuan telah terbunuh sejak Oktober 2023, sementara lebih dari 172.000 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sekitar 11.700 perempuan dan anak perempuan mengalami cedera berat yang mengakibatkan disabilitas permanen. Kondisi ini menambah beban jangka panjang bagi para perempuan penyintas dan keluarga mereka, terutama karena terbatasnya layanan rehabilitasi, pengobatan, dan perawatan khusus.

Kamp Pengungsian Terorganisasi untuk Melindungi Perempuan, Anak Yatim, dan Lansia

Untuk mengetahui lebih jauh kondisi kemanusiaan perempuan Palestina, kami menghubungi Vicki Roob, Direktur Departemen Program Internasional di LIFE for Relief and Development, yang meraih peringkat kelima sebagai salah satu organisasi terbaik yang bekerja di Palestina selama perang, berdasarkan penilaian Charity Navigator.

Vicki menjelaskan besarnya penderitaan yang dialami perempuan Palestina:

“Di antara perubahan sosial paling menonjol yang diungkapkan oleh UN Women adalah kenyataan bahwa sekitar 86.290 keluarga di Gaza kini dikepalai oleh perempuan.

Tanggung jawab para perempuan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan makanan dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup penyediaan tempat tinggal, perlindungan anak-anak, pemantauan pendidikan mereka, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan fisik dan psikologis, di tengah ketiadaan sumber penghasilan yang stabil.”

Abu Sohaib, Direktur Kantor LIFE di Jalur Gaza, menambahkan:

“Sejak awal perang, kami telah menempatkan perempuan sebagai salah satu kelompok prioritas utama dalam penyaluran bantuan, khususnya para janda yang tidak memiliki pencari nafkah.

Atas dasar itu, lahirlah gagasan untuk membangun kamp-kamp pengungsian terorganisasi milik LIFE yang tersebar di wilayah utara, tengah, dan selatan Jalur Gaza. Kami telah membangun sembilan kamp yang menampung sekitar 62.000 keluarga dan menyediakan tenda-tenda yang mampu mengurangi panas pada musim panas serta melindungi para pengungsi dari hujan, air, dan udara dingin pada musim dingin.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OTOMOTIF

Misterius! Mobil Innova Bergerak Maju-Mundur Tanpa Sopir, Ini Cerita Pemilik

Oleh Redaksi · 18 Nov, 15.24 WIB



BANDA ACEH - Pemilik mobil Innova putih yang viral karena berjalan mundur dan maju tanpa pengemudi di parkiran rumahnya di Desa Guyangan, Bangsri, Jepara, buka suara soal kejadian tersebut. Ia mengaku sudah menarik tuas rem tangan saat memarkir mobil itu."Kejadian di rumah, Jumat (13/11) malam, jam 18.30 WIB. Itu habis keluar sebentar tapi sebelum magrib di rumah. Parkirnya cukup lama. Itu saya sudah hand rem, kalau lupa pasti langsung jalan," kata Tomi Adi Setiawan, warga Desa Guyangan saat dihubungi lewat telepon, Selasa (17/11/2026).

"Pas (mobil) jalan sendiri itu nggak ada yang lihat. Itu nggak ada sopirnya, terus ada ibu saya, terus teriak-teriak Itu. Kondisi mesin mati, kunci ada di dalam rumah juga," imbuh dia.

Tomi memastikan video tersebut asli dari rekaman CCTV.

"Itu video asli, bukan editan, bukan. Awalnya mundur. Cuma rekaman CCTV hitam putih, biasanya berwarna," ujar dia.

Tomi menduga mobilnya jalan sendiri tanpa pengemudi karena kondisi jalan yang melengkung. Dari teras rumahnya kondisi jalan menurun, namun seberang jalan sedikit menanjak. Kondisi itu membuat mobil yang sempat mundur itu kemudian kembali maju lagi.

"Perkiraan kurang paham (bisa jalan sendiri). Dari rumah saya Itu jalannya agak tinggi, jalannya agak nanjak. Kemungkinan seperti itu," ucap dia.

"Ngecek CCTV, langsung saya cek, saya ambil videonya. Pas waktu berhenti kok tidak seret, itu masih penasaran saya. Untung tidak kena motor atau kendaraan lain," sambung Tomi.

Dia juga mengaku dihubungi teman dan tetangga setelah video itu jadi viral di media sosial.

"Sejak viral banyak teman dan tetangga yang bertanya, saya juga nggak tahu saya juga heran kok bisa," kata dia.

Diketahui, video itu salah satunya diunggah di akun Tik Tok Bangsaonlineshop. Dalam video itu terlihat mobil berwarna putih yang terpakir di teras rumah tiba-tiba mundur ke jalan. Tak berselang lama, mobil itu melaju ke depan lalu kembali ke teras atau parkiran semula.

"Warga kawasan Guyangan Tejo sebelah timur Kamdowo Kabupaten Jepara digemparkan oleh peristiwa sebuah mobil warna putih yang bergerak maju dan mundur sendiri tanpa pengemudi pada Jumat (13/11) sekitar pukul 18.30 WIB. Kejadian unik yang terekam kamera pengawas CCTV ini viral di media sosial," tulis keterangan akun tersebut.

LINGKUNGAN

Bahlil ternyata Teken Surat Ujung Kulon Jadi Daerah Tambang, Gusur Badak

Oleh Redaksi · 18 Nov, 19.55 WIB



BANDA ACEH -Kawasan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ikut menjadi sorotan setelah terungkap masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan tersebut ternyata sudah diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sejak Februari 2026.Dokumen yang dimaksud adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani langsung oleh Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh Suara.com pada Rabu (18/11/2026), keputusan tersebut menetapkan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang terdiri atas tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Dari peta yang menjadi lampiran keputusan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kawasan berwarna krem yang menandakan Wilayah Usaha Pertambangan.

Artinya, kawasan laut yang berdekatan dengan salah satu benteng terakhir habitat badak Jawa tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan wilayah usaha pertambangan.

Dalam diktum KETIGA, Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 mengatur bahwa Wilayah Usaha Pertambangan menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Cakupannya meliputi wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.

Sementara itu, Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat. Adapun Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Namun, penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin kepada perusahaan untuk langsung melakukan aktivitas eksploitasi.

Persoalan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon ternyata bukan baru muncul pada 2026.

Kementerian ESDM Buka Suara

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten telah mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten, sejak 2013.

Usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Usulan itu kemudian masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Viral Aduan Siswi SMPN di Surabaya, Ungkap Ada Guru Minta Turunkan Celana Dalam untuk Periksa Menstruasi

Oleh Van · 18 Nov, 16.56 WIB



Berita viral mengenai pemeriksaan menstruasi di SMPN 21 Surabaya yang memicu kontroversi.

SURABAYA — Heboh di media sosial mengenai pemeriksaan menstruasi pada siswi di SMPN 21 Surabaya.

Salah satu siswi melakukan pengaduan kepada Wali Kota Eri Cahyadi mengenai prosedur guru-nya memeriksa murid yang sedang menstruasi.

Dalam aduannya, siswi tersebut merasa tidak nyaman karena harus menurunkan celana dalam.

Oknum guru yang melakukan pemeriksaan tersebut, dalam unggahan video di Instagram Eri, mengakui bahwa prosedur tersebut adalah kebijakannya.

“Ada trik-trik dari tahun-tahun lalu, kita berlakukan cara ini, kalau banyak yang tidak salat, kita curiga. Nah, kita pakai trik sendiri,” ujar oknum tersebut, dikutip dari video di akun Instagram @erichayadi_ pada Rabu, 18 November 2026.

Kumpulkan Siswi yang Mengaku Menstruasi dalam Satu Kelas

Lebih lanjut, ia mengaku bahwa para siswi tersebut dikumpulkan dalam satu kelas sebelum dilakukan pemeriksaan.

“Karena kita wanita semua, jadi kita kelompokkan satu kelas. Kita tutup, ada sentuhan pantat dan kita akan lihat, ‘Oh iya ini haid, sudah,’” jelasnya

“Dan dia mengatakan ekspresinya haid, kan kelihatan anaknya. Kalau yang tidak haid, anaknya akan bilang kalau dia belum mandi besar. Jadi, dia mundur, belum disentuh,” sambungnya.

Selanjutnya, oknum guru yang tak disebutkan namanya itu menyebut bahwa siswi diminta untuk sedikit menurunkan celana dalamnya saat diperiksa.

“Dia (siswi) hanya melepaskan (celana) sedikit saja. Enggak sampai penuh ke bawah, sampai itu kelihatan ada bercak (atau tidak),” paparnya.

Mengaku Hanya untuk Sidak dan Aturan Oknum Guru

Saat ditanya mengenai alasan melakukannya, oknum guru itu menyebut bahwa tindakannya seperti inspeksi mendadak (sidak) kepada siswi.

“Itu untuk sidak aja, sidak sesaat. Saat itu aturan dari saya untuk mendidik,” tuturnya.

Tak hanya untuk sidak, oknum guru juga mengaku bahwa prosedur tersebut dilakukan untuk melatih kejujuran para siswi.

“Tidak ada motif lain-lain, hanya melatih kejujuran anak saja dan hanya melakukan saat itu saja,” lanjutnya.

Aduan Siswi pada Wali Kota Surabaya

Prosedur ini terkuak saat salah satu siswi mengadu langsung dengan mengirim pesan kepada Eri Cahyadi.

Pesan tersebut mengungkap bahwa awalnya sekolah punya absensi untuk siswi yang sedang menstruasi dan pemeriksaan dilakukan dengan cara meraba rok untuk memastikan memakai pembalut.

Sampai pada hari Jumat, 30 Oktober 2026, pemeriksaan mengharuskan siswi untuk menurunkan celana dalamnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Hashim, Adik Prabowo Pilihan Ideal Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 18 Nov, 15.46 WIB



Oleh: Hamdi Mustapa

I tengah dinamika Politik menjelang dan selama masa pemerintahan Prabowo Subianto, wacana pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terus bergulir.

Nama-nama dari koalisi maupun luar muncul, namun satu sosok yang paling masuk akal, paling loyal, dan paling minim risiko adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo—adik kandung Prabowo sendiri.

Hashim bukan politisi yang tiba-tiba muncul. Ia adalah penopang utama perjalanan politik kakaknya sejak awal.

Partai Gerindra didirikan pada 2008, dan Hashim berada di posisi Wakil Ketua Dewan Pembina sejak hari pertama. Bahkan nama "Gerindra" sendiri lahir dari gagasannya bersama lingkaran dekat.

Sejak itu ia bekerja di belakang layar: merumuskan arah partai, menjaga jaringan, hingga membiayai kampanye dan perjalanan politik Prabowo dalam berbagai kontestasi.

Ia memilih peran penopang ketimbang mengejar jabatan elektoral sendiri. Itulah bukti perjalanan politik yang panjang dan konsisten di Gerindra.

Loyalitas Hashim sulit dibantah. Hubungan darah plus rekam jejak mendukung bisnis dan politik kakaknya selama bertahun-tahun membuatnya hampir mustahil berkhianat.

Tidak ada kepentingan pribadi yang lebih besar daripada menjaga keberhasilan pemerintahan Prabowo.

Sebagai adik yang selama ini menjadi "benteng kepercayaan keluarga", Hashim memahami betul visi, program, dan gaya kepemimpinan sang Presiden. Ia sudah terlibat dalam perumusan platform Gerindra sejak awal dan kini memegang peran strategis di pemerintahan—sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan.

Posisi-posisi ini membuatnya langsung memahami dan menjalankan program prioritas seperti transisi energi, ketahanan iklim, dan percepatan pembangunan perumahan. Tidak perlu adaptasi panjang; ia sudah "sejiwa" dengan arah kebijakan Presiden.

Keunggulan lain yang krusial adalah absennya rivalitas di 2029. Hashim sudah berusia 72 tahun (lahir 1954) dan sepanjang karier-nya tidak pernah menunjukkan ambisi menjadi calon presiden.

Perannya selalu mendukung, bukan bersaing. Jika ia menjadi cawapres, fokusnya jelas: menstabilkan pemerintahan dan memastikan kelanjutan program Prabowo, bukan menyiapkan diri sebagai pesaing di pemilu berikutnya.

Berbeda dengan figur yang punya basis elektoral kuat dan ambisi jangka panjang, Hashim justru menjadi jaminan kesinambungan tanpa ancaman internal.

Dalam konteks politik Indonesia yang sering diwarnai perhitungan jangka pendek dan potensi dualisme kekuasaan, memilih Hashim berarti memilih stabilitas keluarga, pemahaman program yang mendalam, dan loyalitas yang teruji.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Pendukung Gibran Bidik Ijazah Prabowo sampai Iyeth Bustami

Oleh Redaksi · 18 Nov, 08.46 WIB



0leh:Rosadi Jamani

INDONESIA sedang mengalami wabah baru. Bukan cacar monyet, bukan flu burung, melainkan demam bongkar ijazah. Gejalanya aneh. Kalau ijazah Gibran Rakabuming Raka dipersoalkan, yang mendadak panas justru ijazah orang lain.

Presiden Prabowo Subianto diseret, Iyeth Bustami diungkit, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani ikut diperiksa. Sebentar lagi mungkin ijazah tukang parkir, tukang kopi, sampai penjaga toilet Istana ikut diminta.

Negeri ini benar-benar ajaib. Satu ijazah dipersoalkan, satu republik ikut ujian nasional.

Begini ceritanya, wak!

Polemik ijazah Gibran sebenarnya sudah selesai. Putusan MK dan MA membuatnya terlempar dari istana. Ia mundur. Mungkin saat ini ia sedang main games GTA VI. Atau, ikutan mancing sama Purbaya Yudhi Sadewa, ups.

Nah, setelah mundur, sebagian pendukung Gibran seperti kehilangan remote televisi. Salurannya pindah ke ijazah Prabowo. Lalu Iyeth Bustami. Kemudian Arsul Sani. Semua diburu. Semua dikuliti. Google berubah menjadi fakultas hukum, Facebook menjadi ruang sidang, netizen menjadi profesor penguji.

Iyeth Bustami, anggota DPR dari PKB, tercatat menamatkan SD pada 1986, SMP pada 1989, dan Paket C pada 2008. Lalu apa masalahnya? Paket C adalah pendidikan kesetaraan sah. Bukan ijazah hasil barter tiga karung beras dengan wajah Ade Darmawan.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada 16 November 2026 menyebut banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C. Dari 580 anggota DPR periode 2024-2029, 63 orang tercatat berpendidikan terakhir SMA. Sebanyak 211 orang tidak mencantumkan atau merahasiakan riwayat pendidikan. Ingat, bukan berarti 211 orang itu lulusan Paket C. Jangan sampai angka statistik ikut dipaksa mengaku.

Arsul Sani juga pernah dituduh memiliki ijazah doktor palsu. Ia menjelaskan proses pendidikan doktoralnya melalui Glasgow Caledonian University dan Warsaw Management University, bahkan memperlihatkan ijazah aslinya.

Sekarang pertanyaan saya kepada para pendekar pembongkar ijazah, kalau memang yakin Prabowo, Iyeth, atau siapa pun bermasalah, mengapa hanya berani di media sosial?

Bawa ke pengadilan! Contoh Denny Indrayana cs. Dengan strategi hukum yang jitu, Denny laporkan ijazah Gibran ke MK. Hasilnya, ijazah Gibran dinyatakan tak ada. Ia didaftarkan sebagai Wapres cuma dengan Suket. Dari hal ini, mungkin malu, Gibran menyatakan mundur sebagai orang nomor dua negeri ini.

Nah, bagi pendukung Gibran, kalau Prabowo ada persoalan konstitusional, laporkan juga ke MK.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin